



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dan dengan adanya penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 32);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;  
dan
  - f. Bab VI : Penutup.
- (2) Uraian perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19790801 200501 2 010

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 .....	1
Lampiran .....	I-1
Bab I : PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5. SistematikaPenyusunan .....	I-5
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDSAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	II-1
2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan.....	II-1
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-46
2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	II-47
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Makro .....	III-1
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-4
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-14
BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V-1
BAB VI : PENUTUP .....	VI-1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas Kepala Daerah diantaranya adalah menyusun dan menetapkan RKPD, sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran tahunan RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Dalam perkembangannya yang dinamis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat diubah sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana amanat pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dengan adanya perubahan RKPD ini diharapkan terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan



- Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - j. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemasang;
  - k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  - n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Perubahan RKP Tahun 2022 menjadi masukan dalam penyusunan Perubahan RKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target nasional yang selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyesuaian dengan strategi, arah kebijakan dan target pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo.

- b. Hubungan Dokumen Perubahan RKP Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Perubahan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menjadi acuan dalam menyusun RKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022. Hal ini terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah propinsi yang mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Propinsi sampai Triwulan II Tahun 2022, termasuk penyesuaian rencana pembangunan kewilayahan yang didalamnya termasuk pengembangan kewilayahan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah propinsi ini selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan penyesuaian dan penyesuaian dalam Perubahan RKP Kabupaten Tahun 2022.

- c. Hubungan Dokumen Perubahan RKP Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

RPJMD dijabarkan ke dalam RKP sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Dokumen RKP maupun Perubahan RKP Tahun 2022 sebagai bagian dari penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 merupakan program-program yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan pada RKP maupun perubahan RKP tahun yang direncanakan disesuaikan dengan isu-isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, RPKD maupun perubahan RKP Tahun 2022 yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tahun rencana guna mewujudkan visi **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur"** sesuai RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

- d. Hubungan Dokumen Perubahan RKP Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKP Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan penyesuaian kebijakan dan target sektoral perangkat daerah sebagai hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappelbangda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang kemudian menjadi Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah:

- a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber dayadalam pembangunan daerah;
- b. Penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasar hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, khususnya sasaran pada Tahun 2022;
- b. Tersedianya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan keuangan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2022, serta dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

#### **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika dokumen RKPD.
- BAB II : EVALUASI HASIL RKPD s/d TRIWULAN II TAHUN 2022  
Memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sampai triwulan kedua tahun berjalan (2022).

- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
Memuat penjelasan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan 2022 sampai dengan triwulan kedua dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- BAB VI : PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan**

Evaluasi capaian indikator kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan melihat capaian program sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana berikut:

**2.1.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**a. Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan merupakan salah satu aspek penting pelayanan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kinerja urusan pendidikan berdasarkan target RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 diwakili oleh 3 (tiga) indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5- 15 dalam Satuan pendidikan	%	97,72	93	94,13	94,27	100,1	>
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	%	100	100	100	81,81	81,81	<
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	%	85	51	59,94	51,1	85,25	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator program pada urusan pendidikan, yang melebihi target sebanyak 1 (satu) program sedangkan yang kurang dari target sebanyak 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tidak tercapainya target indikator Program Pengembangan Kurikulum terkait dengan adanya belum tuntasnya pelaksanaan pengembangan, diharapkan pada akhir tahun dapat tercapai. Sedangkan pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan disebabkan dengan menurunnya jumlah tenaga pendidik yang memasuki usia masa pensiun tidak sebanding jumlah penerimaan tenaga pendidik sebagai pengganti.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini	81.810	33.547	41,01
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Dasar	69.645	693.319	99,79
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	145.553	1.046	0,72
4	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Menengah Pertama	34.992	27.511	78,62

Berdasarkan Tabel di atas tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, terdapat 1 (satu) Jenis Pelayanan Dasar yang hampir mencapai target yaitu jenjang Pendidikan Dasar yang mencapai 99,79%. Sedangkan 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar lainnya kurang mencapai target. Adapun penyebab kurang tercapainya Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada usia dini. Sedangkan rendahnya capaian Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan lebih disebabkan terlalu tingginya dalam penentuan besaran target layanan Pendidikan Kesetaraan.

Untuk Jenis Pelayanan Dasar jenjang Pendidikan Menengah Pertama masih belum tercapainya target disebabkan oleh animo untuk bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sukoharjo (khususnya Kota Surakarta) untuk mengejar target kualitas pendidikan yang lebih baik.

**b. Urusan Kesehatan**

Pencapaian kinerja urusan kesehatan didasarkan pada 4 (empat) program dengan 21 (dua puluh satu). Gambaran kinerja urusan kesehatan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	%	100	100	100	50	50	<
		Persentase Puskesmas	%	100	100	100	50	50	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa							
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100	100	100	50	50	<
		Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	32	18	22	18	81,82	<
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	100	34	43	34	79,07	<
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	16	20	40	20	50,00	<
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	53		49	49	100,00	<
		Persentase Capaian UHC	%	95		85	30	35,29	<
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100	95,97	100	36,19	36,19	<
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100	100	100	38,13	38,13	<
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	86,93	100	35,53	35,53	<
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan	%	100	100	100	100	100	=



No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		perbaikan Gizi Masyarakat							
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100	92,54	100	50	50	<
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi	%	100		100	50	50	<
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%	100	77,50	100	57,47	57,47	<
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	97	90	67	35	52,24	<
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	100	92	58	32	55,17	<
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	100	100	100	55	55	<
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	87	84,20	82	81,98	99,97	=
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar	%	25	76,74	45	35,80	100	=
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	100	=

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100	83,73	100	60	60	<
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100	100	100	40	40	<
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	96	71	76	75,10	98,81	<
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	50	42	46	42	91,3	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator program pada urusan kesehatan yang semuanya kurang dari target.

Tidak tercapainya target indikator program terkait cakupan layanan kesehatan belum bisa memenuhi target RKPD, hal tersebut disebabkan masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi sehingga layanan kesehatan belum bisa diberikan kepada masyarakat secara optimal.

### c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terukur melalui 9 (sembilan) indikator program. Gambaran kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan**  
**Penataan Ruang**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	%	71,13	70,14	70,34	70,14	99,71	<
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	%	2,35	2,21	2,24	2,21	98,66	<
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	28	25,82	26	25,82	99,30	<
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8,54	6,48	6,56	6,48	98,78	<
5	Program Pengembangan Permukiman	capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap	%	45,47	21,2	26,1	21,2	81,22	<
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	%	27,78	4,76	26	25	99,3	<
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	prosentase Daerah irigasi yang baik	%	55	43,00	46	43,00	93,48	<
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88,4	88,14	88,2	88,14	99,93	<
9	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan di setiap desa/kelurahan	%	7	0	4	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 (sembilan) indikator program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang tidak mencapai target sebanyak 9 (sembilan) program, namun 8 program hampir mencapai target kecuali yaitu Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Tidak tercapainya target indikator program terkait dengan adanya kewenangan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional berada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, karena pengelolaan sampah regional bersifat lintas Kabupaten/Kota. Rencana Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional masih dalam tahapan study kelayakan.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	907.587	837.114	92,24
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	907.587	888.591	97,71

Berdasarkan Tabel di atas jumlah penduduk yang terlayani air minum layak baru mencapai 837.114 jiwa (92,24%) yang berarti masih terdapat 70.473 penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak. Selanjutnya untuk pemenuhan sanitasi pada akhir tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo telah dinyatakan sebagai Kabupaten *Open Defecation Free (ODF)* atau dengan perkataan lain bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan (Stop BABS). Jumlah penduduk yang terlayani akses layak sebesar 97,71% sehingga perlu diupayakan untuk menuntaskan pencapaian target 100% akses sanitasi layak.

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terukur melalui ketercapaian 4 (empat) indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	%	100	100	100	35,36	35	<
2	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog)	%	20	20	20	10	10	=
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase penurunan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	%	100	20	100	38	38	<
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Prosentase penerbitan sertipikat pengembang perumahan	%	100	100	100	-	-	<
5	Program Kawasan Permukiman	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	32	32	32	3,85	3	<
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Prosentase penanganan PSU Perumahan	%	100	100	100	18,20	18	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 program dengan 6 target indikator kinerja. Realisasi capaian indikator program yaitu 1 program sama dengan target, 5 program kurang dari target, dan 1 program belum melaksanakan.

Kurang tercapainya target disebabkan oleh proses untuk pekerjaan yang bersifat fisik masih dalam proses pengadaan barang jasa. Sedangkan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terkendala belum terwujudnya dukungan regulasi teknis yang memadai

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	NA	NA	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Presentase jumlah unit rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	NA	NA	-

Berdasarkan Tabel di atas maka tidak terdapat jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten, dikarenakan tidak ada program pemerintah Kabupaten yang mengakibatkan terjadinya relokasi rumah penduduk. Sedangkan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana masih dilakukan sebatas rehabilitasi ringan, karena jenis bencana di Kabupaten Sukoharjo yang dominan yaitu banjir dan angin ribut skala dampaknya tidak sampai menimbulkan kerusakan yang berat/fatal.

**e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab 2 OPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD. Kinerja urusan tersebut terukur melalui ketercapaian 3 indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	97,6	93	97,3	96,7	99,3	<
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	95,6	94	95,3	48	50,36	<
3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanggulangan bencana	%	100	100	100	50	50	=

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 program. Realisasi capaian indikator program yaitu 1 program sama dengan target dan 2 program kurang dari target. Untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kurang tercapai dari target, namun optimis dapat tercapai akhir tahun. sedangkan untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran kurang tercapai dari target dikarenakan permasalahan keterbatasan jumlah armada dan personil serta *coverage* layanan.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	250	250	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	170	170	100
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4.500	290	6,4
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.500	2.265	50,3
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.500	6.500	100

Berdasarkan Tabel di atas maka terdapat 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar yang mencapai target yaitu (1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; (2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Sedangkan Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana masih dibawah target, hal ini dikarenakan masih minimnya ketersediaan data dan informasi kawasan rawan bencana dan belum dilakukannya penyebarluasan secara masif kawasan rawan bencana. Sedangkan terhadap Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana masih dibawah target, hal ini lebih disebabkan permasalahan minimnya upaya-upaya guna pencegahan bencana dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya kejadian bencana.

## f. Urusan Sosial

Kinerja Urusan Sosial dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 5 indikator. Adapun gambaran kinerja Urusan Bidang Sosial ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	6,12	3,52	4,13	0,65	15,74	<
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	100	31,8	100	12,48	12,48	<
3	Program Penanganan Bencana	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	73,91	65,9	73,91	54,35	73,54	<
4	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	19,99	10,65	15,99	24,84	155,38	>
5	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	99,42	32,8	47,65	30,36	63,71	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 (lima) program. Realisasi capaian indikator program yaitu 1 program melebihi target yaitu Prosentase penanganan rehabilitasi social (Karena yang ditangani berdasarkan ajuan dari masyarakat) dan 4 program kurang dari target. Untuk Program Penanganan Bencana dan Program Pemberdayaan Sosial kurang tercapai dari target, namun optimis dapat tercapai akhir tahun. Sedangkan untuk Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial kurang tercapai dari target dikarenakan permasalahan masih berjalannya *coverage* layanan. Untuk Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tergantung pada fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara. Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.11**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten /kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	6.512	28	0,43
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	859	10	1,2
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200	14	7
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	677	10	1,5
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	250	85	34

Berdasarkan Tabel di atas maka semua Jenis Pelayanan Dasar bidang Sosial masih dibawah target. Permasalahan penanganan kesejahteraan sosial adalah kondisi belum terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ada banyak PMKS yang belum atau bahkan tidak memiliki administrasi kependudukan padahal dalam pengurusan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus memiliki data administrasi kependudukan yang benar.

### 2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### a. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat melalui 4 indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase akurasi proyeksi indikator dalam RTK	%	90	85	90	85	94,4	<
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,48	0,42	0,36	0,38	105,6	>
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	prosentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan	%	83	75,16	83	77	92,7	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		luar negeri ) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota							
4	Program Hubungan Industrial	Prosentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	46,93	26	46,79	30	64,1	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 (empat) program. Satu program yaitu Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja melebihi target, sedangkan yang 3 (tiga) program kurang dari target. Salah satu program yang perlu mendapatkan penekanan adalah Program Hubungan Industrial, yang capaiannya masih separuh dari target. Permasalahannya adalah masih kurangnya fasilitasi dan pembinaan untuk penerapan tata kelola kerja yang layak.

#### b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian enam indikator. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	50	25	20	20	100	=
2	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	26	26	<
3	Program Peningkatan	Persentase perempuan	%	0,18	0,12	0,15	0,15	100	=

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
	Kualitas Keluarga	yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi							
4	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	50	40	20	20	100	=
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Skor Kabupaten Layak Anak	nilai	750	650	675	645	95,55	<
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	35	35	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan anak cukup baik. Dari 6 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya sama dengan target, 1 indikator yang capaiannya akan tercapai dan 2 indikator yang capaiannya kurang dari target tahun 2022 dan perlu upaya keras yaitu Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti dan Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti.

### c. Urusan Pangan

Kinerja Urusan Pangan dapat diukur melalui ketercapaian 7 indikator dari 4 program. Gambaran ketercapaian indikator program tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	%	13,17	8,98	10,78	9,58	88,86	<
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	%	127,91	153,96	120,8	n.a	n.a	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
	Pangan Masyarakat								
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	5,9	5,83	6,8	3	157,14	>
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%	20,9	7,64	21,7	6	172,35	>
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Cabe	%	46,1	19,63	47,5	18	162,11	>
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	%	75	25	37,5	0	0	<
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	%	43,75	37,50	37,5	37,5	100	=

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan pangan adalah baik. Dari 7 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya di atas target tahun 2022, 1 indikator capaiannya akan tercapai, 1 indikator belum ada data (Data pendukung analisis ketersediaan baru tersedia pada TW III), 1 indikator capaiannya sama dengan target tahun 2022 dan 1 indikator yang capaiannya kurang dari target tahun 2022 dan perlu upaya keras yaitu Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Bantuan yang mendukung tercapainya program belum bisa direalisasikan karena adanya wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK). Sehingga menunggu menurunnya wabah PMK.
- b. Pada TW II baru dilakukan pelacakan kasus rawan pangan dan gizi, sehingga bantuan rawan pangan dijadwalkan pada TW III

#### d. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian tiga indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penanganan sengketa tanah garapan	%	79	16	20	17	85	<
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	93	27	40	30	75	<
3	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	93	32	48	35	73	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan maka capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) program belum mencapai target. Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum selesainya ganti rugi pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Timur Sukoharjo, dan proses penyelesaian pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Langsur.

**e. Urusan Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 11 indikator. Gambaran ketercapaian indikator Urusan Lingkungan Hidup tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	39	9,34	23,9	<
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	%	100	86,23	40	15,49	38,72	<
		Prosentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi	%	31	30,27	27	18,40	68,14	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		perubahan iklim							
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	31,8	31,8	100	17,68	17,68	<
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	%	100	100	40	9,68	11	<
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Prosentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, PUULH, dan izin yang diterbitkan oleh kabupaten	%	100	100	40	12,35	15	<
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	%	100	100	24	5,54	8	<
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	%	100	100	20	5,42	9	<
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100	29,42	30	<
9	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	%	70	67,19	73	27,71	28	<
		Prosentase pengurangan sampah	%	30	29,06	26	4,20	5	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan Tabel di atas maka kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup maka capaian kinerja sebanyak 9 (sembilan) program dengan 11 indikator kinerja belum mencapai target. Permasalahan lingkungan hidup menyangkut belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup, belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA), belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya dan Kapasitas TPA perlu ditingkatkan.

**f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian lima indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100	50	50	< (akan tercapai)
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100	50	50	< (akan tercapai)
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100	100	100	50	50	< (akan tercapai)
		Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	100	100	30	30	< (perlu upaya keras)
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100	90	90	< (akan tercapai)

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang cukup baik. 4 indikator akan tercapai, dikarenakan kegiatan pendukung program tersebut baru dilaksanakan sampai dengan triwulan II dan bersifat pelayanan langsung kepada publik. Sedangkan terdapat satu indikator yang memerlukan upaya

keras yaitu Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

**g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diukur melalui ketercapaian 4 (empat) indikator. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.18**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penataan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100	50	50	<
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa Yang Melakukan Kerja Sama Desa	%	12,67	2,67	4,67	4,67	100	=
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan/ Dibina	%	50	33,33	50	33,33	66	<
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib	%	66,67	33,33	40	36,67	92	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan kinerja 1 program sesuai target dan 3 program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.

**h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 3 (tiga) indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	%	50	50	25	20	80	<
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70	70	68,85	20	29	<
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	%	80	80	74	20	27	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja 3 program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan belum optimalnya efektifitasnya pembinaan cakupan peserta KB aktif dan kurang aktifnya kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

#### i. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan terukur melalui capaian 3 program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.20**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	86	80	82	45	54,88	<
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	11,98	10,27	10,27	8,27	80,53	<
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	%	100	98,47	100	50	50	<
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100	91,62	100	10,46	10,46	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Perhubungan menunjukkan kinerja 3 program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya proses pekerjaan fisik pemenuhan sarana prasarana lalu lintas. Adapun pengelolaan perkeretaapian menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan sedangkan Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan fasilitasi dari aspek kewilayahan.

**j. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informasi dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian dari 2 (dua) program. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Badan Publik Terbuka	%	75	35	35	34,6	34,6	<
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	%	100	98,7	80	21,6	27	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Komunikasi dan Informasi menunjukkan kinerja 2 program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya proses pengadaan barang jasa (jaringan FO (*fiber optic*) dan belum optimalnya pengelolaan aplikasi informatika.

**k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat diukur melalui ketercapaian lima indikator. Gambaran capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.22**  
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Permohonan izin pembukaan kantor	%	100	100	100	50%	50	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP							
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	84,5	81,46	82,5	81,7	99	<
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	82	58,84	65	30	46	<
4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	%	30	8,45	14	12	85	<
5	Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	30	23	26	23	88	<
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	6	3	4	3	75	<
7	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM	%	30	6	26	15	57	<
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase kemitraan KUMKM	%	8,18	6	6,66	6	90	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan minimnya kondisi data kesehatan KSP/USP dan kurang validnya data UMKM akibat kebijakan pemberian bantuan secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

## I. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian delapan indikator. Gambaran Kinerja Urusan Penanaman Modal ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	%	100	100	100	59	59	<
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	%	100	100	100	59	59	<
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	%	100	100	100	59	59	<
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	50	50	<
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	%	100	100	100	83	83	<
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100	100	100	13	13	<
4	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100	100	100	63	63	<
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	100	100	100	60	60	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan minimnya kondisi data kesehatan KSP/USP dan kurang validnya data UMKM akibat kebijakan pemberian bantuan secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

#### m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur melalui ketercapaian 3 indikator. Gambaran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.24**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	66,67	42,23	50	43	86	<
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pramuka berprestasi	%	18	8	12	8	67	<
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	%	72,5	54,88	62,5	55	88	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan minimnya talenta atlet olah raga, minimnya pembinaan pramuka serta kurangnya fasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan.

#### n. Urusan Statistik

Urusan Statistik dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian satu indikator. Gambaran ketercapaian Urusan Statistik ditampilkan pada table berikut.

**Tabel 2.25**  
**Capaian Kinerja Urusan Statistik**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100	94,8	70	19,0	27	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Statistik menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya proses survey, pengumpulan dan pengolahan data sehingga data belum bisa di *publish*.

**o. Urusan Persandian**

Urusan Persandian dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian satu indikator. Gambaran ketercapaian Urusan Persandian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Capaian Kinerja Urusan Persandian**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Prosentase Ketersediaan sarana keamanan informasi	%	69	97,3	60	11,8	20	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Persandian menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Hal ini dikarenakan masih dalam proses tahapan *assesment* indeks keamanan informasi.

**p. Urusan Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	%	60	10	20	15	75	<
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	18	2	2	2	100	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Kebudayaan menunjukkan kinerja Program Pengembangan Kebudayaan belum sesuai target. Sedangkan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sudah sesuai target. Belum tercapainya target dikarenakan obyek pemajuan kebudayaan yang berkembang terkendala data inventarisasi obyek.

#### q. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase pembinaan perpustakaan dan kegemaran membaca	%	53	39,91	48	24	50	<
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	21	0	14	0	0	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Perpustakaan menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Program pembinaan perpustakaan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca (literasi) belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan dampak pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan beralihnya masyarakat untuk memanfaatkan gadget. Sedangkan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno belum dilaksanakan disebabkan ketiadaan koleksi naskah yang perlu dilestarikan. Pada tahun 2022 baru tahap identifikasi.

#### r. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	41,9	8	16,9	10,6	62,72	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,25	4	12,9	5,4	41,86	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Kearsipan menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Permasalahan yang ada adalah Program pengelolaan Arsip masih terkendala dengan belum selesainya pembangunan Gedung Depo Arsip.

### 2.1.3. Urusan Pilihan

#### a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.30**

#### **Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	ton	412,33	390	400,21	395	98	<
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton	16.015,82	13.900	14.330	14.000	98	<
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	RTP	75	23	35	30	86	<
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	%	75	28	45	35	78	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target



Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Kelautan dan Perikanan menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi.

#### b. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.31**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan	%	50	10	20	15	75	<
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase even pariwisata yang dilaksanakan	%	19	11	11	11	100	=
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	%	50	13	18,7	15	80	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Pariwisata menunjukkan kinerja 2 program belum sesuai target. Hal ini lebih disebabkan kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, yang sedang menuju masa transisi menjadi endemi serta kurangnya daya tarik wisata yang cenderung monoton.

#### c. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian program sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	%	97	95	95,5	95	99,4	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	94	80	92	81	88	
		Prosentase Kelompok Menggunakan Alsintan	%	80	60	72	65	90	<
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	%	80	68	72	69	95	<
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	Ha	50216	48000	49750	48500	97	<
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	%	51	35	44	37	84	<
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen	%	35	32	33	32	97	<
4	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan nilai klas kelompok	%	3	1	2	1	50	<
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	35	32	33	32	97	<
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	unit	21227,72	19000	20229	19000	94	<
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	%	100	50	70	60	86	<
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	%	0,1	0,01	0,1	0,01	10	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Pertanian menunjukkan kinerja program belum sesuai target. Permasalahan yang muncul menyangkut kondisi cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi

tingkat produksi dan munculnya penyakit (PMK) yang mempengaruhi tingkat kesehatan hewan.

#### d. Urusan Perdagangan

Kinerja Urusan Perdagangan dapat diukur kinerjanya berdasarkan ketercapaian tujuh indikator. Gambaran Kinerja Urusan Perdagangan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	99	84,6	84,6	76,9	90,8	<
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengendalian Harga	% %	100	100	100	50	50	<
		Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	%	6,7	6,4	6,4	6,06	94	<
3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	%	0,5	0,3	0,3	0,2	66,7	<
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	53,8	23,1	23,1	38,46	166	>
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	10	10	10	2	20	<
6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	%	100	20	40	35	87,5	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa urusan Perdagangan menunjukkan kinerja program 1 sudah melebihi target dan 6 belum sesuai target. Permasalahan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri masih perlu dipacu, seiring kebijakan P3DN.

#### e. Urusan Perindustrian

Kinerja Urusan Perindustrian dapat diukur kinerjanya berdasarkan ketercapaian tiga indikator. Gambaran Kinerja Urusan Perindustrian ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.34**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	17	17	17	17	100	=
2	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	%	90	90	90	50	55,55	<
3	Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara Lengkap dan Terkini	dok	8	8	8	0	0	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Capaian urusan bidang perindustrian 1 indikator telah tercapai, indikator Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan akan tercapai dan indikator jumlah informasi industri secara Lengkap dan Terkini perlu upaya keras.

#### f. Urusan Transmigrasi

Pengukuran kinerja Urusan Transmigrasi dilakukan melalui ketercapaian tiga indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.35**  
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program pembangunan Kawasan transmigrasi	terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	%	100	0	100	0	0	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua kinerja urusan transmigrasi hingga tengah triwulan kedua 2022 tidak optimal. Hal ini disebabkan implementasi program kegiatan ditentukan oleh kebijakan alokasi penempatan oleh pemerintah pusat.

## 2.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### a. Sekretariat Daerah

Indikator unsur pendukung urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah berjumlah 9 indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**(Sekretariat Daerah)**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	%	100	100	100	50	50	<
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	98	94	96	48,68	50,70	<
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	100	100	39,76	39,76	<
2	Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100	100	100	16,7	16,7	<
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	%	55	35	35	25,29	72	<
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan money pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	79	100	50	50	<
3	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	95	68	74	50	67,57	<
4	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	92	46	50	<
		Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100	100	0	0	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Dari kesembilan indikator capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan karena baru berjalan sampai dengan triwulan II, khusus untuk indikator Cakupan pengadaan barang dan jasa, nilai yang diisikan nilai tahun 2021 karena penilaian tahun ini dilaksanakan di akhir tahun.

**b. Sekretariat DPRD**

Kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan oleh Sekretariat Daerah diukur melalui tiga indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

**Tabel 2.37**  
**Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**(Sekretariat DPRD)**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	90	90	90	36,94	41,04	>
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelayanan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Bagian Anggaran dan Pengawasan	%	100	100	100	37,88	37,88	<
3	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	39,85	39,85	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan seluruh indikator kinerja unsur pendukung urusan pemerintah daerah yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD memiliki capaian di bawah target RKPD 2022. Hal ini disebabkan kegiatan yang mendukung ketercapaian target indikator tersebut masih berlangsung.

**2.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

**a. Perencanaan Pembangunan**

Kinerja Perencanaan dapat diukur melalui ketercapaian 5 indikator yang, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam )	%	100	80	84	60	71,43	<
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	80	84	60	71,43	<
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	80	85	60	71,43	<
2	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Prosentase Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD	%	100	90	100	66,7	66,7	<
3	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	50	50	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 indikator yang capaian kerjanya belum mencapai target, sehingga perlu upaya keras untuk mencapainya.

**b. Keuangan**

Kinerja Urusan Keuangan dapat dilihat berdasarkan ketercapaian enam indikator, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Kinerja Urusan Keuangan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD	%	100	100	100	19,23	19,23	<
		Persentase OPD yg taat	%	100	100	100	45,45	45,45	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yg telah ditetapkan							
		Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	100	100	24,07	24,07	<
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100	100	100	9,23	9,23	<
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Target PAD	%	100	25,61	3 sd 5	45,00	45,00	<
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	33,50	33,50	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa kinerja Urusan Keuangan dari keempat indikator belum mencapai target dan perlu usaha keras.

### c. Kepegawaian

Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian dapat diukur melalui ketercapaian empat indikator ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.40**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program kepegawaian Daerah	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	100	100	100	80	80	<
		Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN	%	100	97	97	94,67	97,60	<
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	%	80	100	60	92,9	154,83	>
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	%	90	100	83	75	90,36	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target



Capaian kinerja bidang urusan terdapat satu indikator yang melampaui target dan tiga indikator yang belum memenuhi target, dengan kondisi akan tercapai di akhir tahun.

#### d. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian dan Diklat dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%	98	75,4	90	64,7	71,89	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Capaian indikator di atas masih di bawah target, dan akan tercapai pada akhir tahun.

#### e. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diukur melalui ketercapaian satu indikator ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	100	=

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Indikator urusan penelitian dan pengembangan telah tercapai 100 persen.

### 2.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

#### a. Pengawasan

Kinerja unsur Pengawasan dapat diukur melalui tiga indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Kinerja Unsur Pengawasan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP	%	90	89	89	49	55,06	<
2	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	%	100	100	100	51	51,00	<
3	Program penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase cakupan pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	%	80	80	80	45	56,25	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut kinerja urusan pengawasan masih dibawah target tahun 2022, akan tetapi progres tersebut baru berjalan sampai dengan triwulan II, sehingga tingkat ketercapaian targetnya pada akhir diharapkan mencapai 100%.

### 2.1.7. Urusan Kewilayahan

#### a. Kecamatan

Urusan Kewilayahan diampu oleh 12 kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo, yang mempunyai 6 program yang identik. Kinerjanya dapat diukur melalui pencapaian 6 indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.44**  
**Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Kartasura)	%	100	100	100	26	26	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Gatak)	%	100	100	100	28,69	28,69	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Baki)	%	100	96,73	100	19,90	19,90	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Grogol)	%	100	100	100	45,59	45,59	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Mojolaban)	%	100	99,56	100	34,92	34,92	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Polokarto)	%	100	98,09	100	56,52	56,52	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Bendosari)	%	100	100	100	51,44	51,44	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	55,73	55,73	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	29,70	29,70	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Tawang Sari)	%	100	100	100	35,5	35,50	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Bulu)	%	100	100	100	24,44	24,44	<
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Weru)	%	100	100	100	50	50,00	<
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kartasura)	%	100	98,22	100	55	55	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	%	100	100	100	6,74	6,74	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Gatak)							
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Baki)	%	100	100	100	19,13	19,13	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Grogol)	%	100	100	100	58,00	58,00	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Mojolaban)	%	100	95,90	100	23,79	23,79	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Polokarto)	%	100	89,25	100	62,25	62,25	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Bendosari)	%	100	100	100	0	0	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	39,33	39,33	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	22,25	22,25	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	40,00	40,00	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		(Kecamatan Tawang Sari)							
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Bulu)	%	100	100	100	52,10	52,10	<
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Weru)	%	100	100	100	50	50,00	<
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Kartasura)	%	100	76,93	100	36,72	36,72	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Gatak)	%	100	100	100	20,00	20,00	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Baki)	%	100	100	100	56,57	56,57	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Grogol)	%	100	96,30	100	34,64	34,64	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Mojolaban)	%	100	98,71	100	27,84	27,84	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Polokarto)	%	100	99,25	100	71,93	71,93	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Bendosari)	%	100	100	100	12,50	12,50	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	23,67	23,67	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	20,76	20,76	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Tawang Sari)	%	100	100	100	30,50	30,50	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Bulu)	%	100	100	100	22,49	22,49	<
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Weru)	%	100	100	100	12,02	12,02	<
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Kartasura)	%	100	100,00	100	25,51	25,51	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Gatak)	%	100	100	100	21,27	21,27	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Baki)	%	100	99,27	100	21,88	21,88	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Grogol)	%	100	95,38	100	21,2	21,20	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Mojolaban)	%	100	94,43	100	25,96	25,96	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Polokarto)	%	100	97,67	100	13,98	13,98	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	95,38	100	22,77	22,77	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		(Kecamatan Bendosari)							
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	42,82	42,82	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	20,73	20,73	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Tawang Sari)	%	100	100	100	37,5	37,5	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Bulu)	%	100	90,77	100	22,23	20,83	<
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kecamatan Weru)	%	100	100	100	50,00	50,00	<
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Kartasura)	%	100	87,51	100	32,20	32,20	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Gatak)	%	100	100	100	47,13	47,13	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Baki)	%	100	98,85	100	62,52	63	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Grogol)	%	100	95,38	100	21,20	21,20	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	98,56	100	48,50	48,50	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		(Kecamatan Mojolaban)							
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Polokarto)	%	100	98,53	100	60,29	60,29	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Bendosari)	%	100	100	100	39,16	39,16	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	0	0	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	46,82	46,82	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Tawang Sari)	%	100	100	100	37,5	37,5	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Bulu)	%	100	99,10	100	73,35	73,35	<
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Weru)	%	100	100	100	42,66	42,66	<
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Kartasura)	%	100	92,93	100	43,59	43,59	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Gatak)	%	100	100	100	38,90	38,90	<
		Persentase pelaksanaan	%	100	98,78	100	37,34	37,34	<



No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Baki)							
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Grogol)	%	100	94,03	100	58,00	58,00	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Mojolaban)	%	100	94,43	100	42,93	42,93	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Polokarto)	%	100	92,70	100	30,88	30,88	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Bendosari)	%	100	100	100	41,06	41,06	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Sukoharjo)	%	100	100	100	40,41	40,41	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Nguter)	%	100	100	100	45,53	45,53	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan Tawang Sari)	%	100	100	100	50,1	50,10	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah (Kecamatan BULU)	%	100	94,02	100	40,94	40,94	<
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	45,20	45,20	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
		(Kecamatan Weru)							

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan seluruh indikator kinerja unsur kewilayahan urusan pemerintah daerah yang dijalankan oleh Kecamatan memiliki capaian di bawah target RKPD 2022. Hal ini disebabkan kegiatan yang mendukung ketercapaian target indikator tersebut masih berlangsung.

## 2.1.8. Urusan Pemerintahan Umum

### a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui ketercapaian lima indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum**

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
1	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa	%	98	85	89	25,2	28,31	<
2	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Prosentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	91	71	75	18,74	24,99	<
3	Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	91	75	79	48,60	61,52	<
4	Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Prosentase pemahaman politik bagi masyarakat	%	80	78	78	13,64	17,49	<
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan	Prosentase masyarakat yang paham terhadap	%	88	70	75	45,95	61,27	<

No	Program	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Thn 2021	Target 2022	Realisasi 2022 s.d TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2022)	Status Capaian
	ekonomi, Sosial dan Budaya	sosial, budaya, dan agama							
6	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	43,78	47,78	<

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusankesatuan bangsa dan politik relatif belum optimal. Dari kesemua indikator yang memiliki capaian di bawah target RKPD 2022. Sehingga perlu upaya keras dalam mencapainya

## 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi. Berdasarkan analisis ketercapaian indikator program hingga triwulan kedua di tahun 2022, permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan; kesehatan; pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; kesetaraan gender; perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak; penguatan keberdayaan pemuda terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
- b. Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu;
- c. Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Belum mantapnya kualitas infrastuktur;
- f. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- g. Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah;
- h. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
- i. Perlunya perluasan kerjasama antar regional daerah, dunia usaha dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah,

penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi, perbaikan kapasitas fiskal dan percepatan pencapaian target SPM.

### **2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, Isu strategis pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah:

#### **1. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

Tahun 2020 terjadi kejadian global yang luar biasa, yaitu Pandemi COVID-19. Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi ini dalam rangka menyikapi penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, dimana WHO (World Health Organization) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Sampai saat ini, pandemi covid-19 masih berlangsung dan memberi dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Berbagai sektor mengalami tekanan, seperti sektor kesehatan terkait penanganan wabah. Selama tahun 2020, jumlah penderita terus mengalami kenaikan dan memberikan dampak kepada tenaga medis dalam rangka penanganan kasus tersebut. Selain sektor kesehatan, covid-19 juga berdampak pada sektor Pendidikan. Adanya pandemi ini membatasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, sehingga pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui daring. Metode ini berdampak pada kebutuhan jaringan internet untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Sektor transportasi dan pariwisata banyak mengalami kerugian yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja. Pandemi ini juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian. Dampak terhadap sektor perekonomian ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional turun sebesar -2,07 di tahun 2020.

Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo pada masa kehidupan normal baru ini antara lain: (i) mitigasi risiko pada perencanaan jangka menengah. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian dan meningkatkan resiliensi masyarakat Sukoharjo; (ii) Perbaikan pelayanan kesehatan; (iii) revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama Covid-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan jangka panjang; (iv) Peningkatan akses terhadap jaringan teknologi informasi untuk pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan layanan sosial; (v) Perluasan akses terhadap jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

## **2. Disparitas Wilayah**

Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (b) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; dan (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;

Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni baru, air minum layak, sanitasi (air limbah) layak; (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70 persen APBD Kabupaten dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

## **3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

### **a. Pemenuhan Layanan Dasar**

Isu peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan.

Variabel kesehatan dipengaruhi oleh komponen medis dan non-medis, yaitu lingkungan sosial ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, intervensi penyelesaian masalah kesehatan juga memerlukan intervensi dari sektor di luar kesehatan, misalnya kebijakan sarana prasarana lingkungan, jaminan kesejahteraan sosial, komunitas siaga, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas untuk membentuk pola hidup bersih dan sehat perlu dibangun sebagai salah satu alternatif menjawab masalah kesehatan di masa mendatang. Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

**b. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis bidang kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Hak idnetitas hkum kpendudukan menjadi hak semua penduduk. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana melayanai administrasi bagi semua warga dengan tepat dan cepat. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluar-ga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

**c. Kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak**

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

**d. Penguatan Keberdayaan Pemuda**

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri.

Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

#### **4. Ketenagakerjaan**

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Tantangan globalisasi revolusi industri 4.0 adalah penyesuaian kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan lapangan.

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sampai dengan tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.977 orang. Di tahun 2020 pencari kerja terbanyak di lulusan SLTA/SMK sebanyak 2006 orang. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2016-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 63,98%, rasionya menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 65,85%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung menurun, dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 66,08 % menjadi 68.74% pada tahun 2020. Penurunan Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2016-2018 dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Perkembangan TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 2,78 pada tahun 2016 sampai dengan 2,27 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada angka 6,93. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena corona virus disease di akhir 2020 sehingga banyak terjadi PHK di sektor industri mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Meskipun terjadi kenaikan, TPT Kabupaten Sukoharjo Relatif berada di bawah TPT Nasional.

#### **5. Kemiskinan**

Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7.14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen.

Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

## **6. Kebudayaan dan Karakter Bangsa**

Daya saing sumber daya manusia yang berbasis pada nilai-nilai budaya menjadi fokus perhatian. Tantangan strategis adalah bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal yang termanifestasi dalam pola kebiasaan hidup sehari-hari, pengembangan seni dan industri kreatif berbasis budaya. Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal dalam perkembangan kabupaten Sukoharjo masa kini.

## **7. Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

### **a. Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah**

Infrastruktur konektivitas wilayah mencakup jalan raya, perhubungan, dan sarana prasarana komunikasi informasi. Disparitas atau ketimpangan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur tiap daerah. Beberapa penyebab ketimpangan wilayah antara lain, pertama, kondisi wilayah yang lebih menguntungkan/kurang menguntungkan secara ekonomi. Kedua, perbedaan kualitas kemampuan penduduk. Semakin tinggi kualitas kelompok masyarakat tertentu semakin tinggi potensi pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi relatif



tinggi. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tinggi dan kurang berkualitas akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita Ketiga, perbedaan kecukupan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik akan mengganggu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, perbedaan investasi dan alokasi dana pembangunan antar wilayah akan berpengaruh pada ragam fasilitas dan layanan publik, sehingga menambah ketimpangan wilayah. Ketimpangan infrastruktur dampak berdampak pada hambatan mobilitas sosial, sehingga menambah ketimpangan wilayah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai enabler maupun katalisator dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui komponen smart people (masyarakat cerdas) dan aparatur yang cerdas, dan smart government (pemerintahan yang cerdas). Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik..

Jadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana Memperkuat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan merata di seluruh wilayah sehingga tidak memperkecil kesenjangan antar wilayah;

#### **b. Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat**

Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan penduduk kabupaten.

Tantangan yang perlu diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai, antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

#### **8. Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim**

Pertumbuhan wilayah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah terkait kebersihan air, udara, tanah dari polusi.

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan yaitu penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair

domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air tanah.

Pencemaran udara dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan alat elektronik kontributor kerusakan ozon dan jumlah kendaraan bermotor. Sumber pencemaran lingkungan lainnya adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan yang berkativitas sosial/ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan.

Lingkungan yang tidak dijaga juga berpotensi tidak tangguh menghadapi risiko bencana. Kesejahteraan masyarakat akan terganggu dengan kehadiran bencana. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu tantangan strategisnya adalah penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana.

Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, sosial, dan budaya jangan sampai membahayakan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah membangun lingkungan sehat dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana.

## **9. Kondusivitas Daerah dan pelayanan publik**

### **a. Kondusivitas Daerah**

Kesadaran masyarakat yang tinggi harus ditanamkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu kesbanglinmas, kantor polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan

ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **b. Pelayanan Publik**

Reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas stakeholder. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit, mampu menciptakan pelayanan publik yang agile (lincah).

Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan tata administrasi perkantoran maupun pelayanan publik. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya *website* oleh perangkat daerah, khususnya terkait dengan *updating* dan penyediaan data terkait kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain diperlukan akselerasi pengembangan *smart governance* dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel memerlukan analisis pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terbaru, serta menghasilkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas-akademisi-media (*Pentahelix*) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu penting untuk pemasaran (*marketing*) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari

swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tantangan pemerintah adalah bagaimana menjaga kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja pelayanan. Tantangan berikutnya adalah menggunakan secara efektif unit aduan yang mengelola dan menindaklanjuti setiap aduan yang diberikan oleh penerima layanan yang dalam hal ini adalah responden survey kepuasan masyarakat. peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan kolaborasi pemerintah dengan pilat *pentahelix*, yaitu: dunia usaha, forum komunitas, akademisi, media.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Kerangka Ekonomi Makro**

##### **3.1.1. Perekonomian Nasional**

Munculnya varian Omicron Covid-19 disusul varian BA.4 dan BA.5 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung. Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin resilien.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (*yoy*) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%), dan Jerman (4,0%). Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% hingga 4,5%. Sementara itu, berbagai lembaga internasional seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran antara 5% hingga 5,4%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Kinerja ekonomi yang berhasil diperoleh ini tidak terlepas dari solidnya kerja sama antara Pemerintah dan seluruh stakeholders dalam bersinergi melakukan pengendalian *Covid-19* dan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasilnya, kepercayaan masyarakat maupun investor semakin menguat dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Berbagai program PEN termasuk upaya *front loading* yang digulirkan oleh Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Melalui pemberian insentif bagi dunia usaha, aktivitas produksi mampu terekspansi yang terlihat dari pertumbuhan positif pada mayoritas lapangan usaha.

Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 5,07% (*yoy*). Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan yakni Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79% (*yoy*) dan hal ini sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin pulih. Berbagai sektor lainnya yang mendukung aktivitas di tengah pandemi *Covid-19* seperti Sektor Jasa Kesehatan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan yang kuat.

Aktivitas Sektor Produksi yang terus meningkat berhasil memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas, tercermin dari kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 4,55 juta orang pada Februari 2022. Khusus untuk pekerja penuh waktu tercatat sebanyak 88,42 juta orang atau naik sebanyak 4,28 juta orang dan kenaikan juga terjadi pada pekerja paruh waktu. Angka ini juga terkonfirmasi dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi sebesar 5,83% dari sebelumnya 6,26% pada Februari 2021.

Di sisi pengeluaran, percepatan penyaluran perlindungan sosial memberikan dorongan bagi daya beli masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,34% (*yoy*). Ditambah lagi, pelonggaran mobilitas masyarakat turut mendorong aktivitas ekonomi sehingga menjadi insentif bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi sehingga PMTB mampu tumbuh sebesar 4,09% (*yoy*).

Sementara itu, kenaikan signifikan dialami oleh performa perdagangan internasional, dimana ekspor tumbuh *double digit* sebesar 16,22% (*yoy*), sementara impor tumbuh sebesar 15,03% (*yoy*). Kondisi ini terjadi seiring dengan kenaikan harga secara signifikan di berbagai komoditas unggulan Indonesia. Di sisi lain, meskipun Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar -7,74% (*yoy*), hal ini merupakan indikasi positif berkurangnya biaya penanganan pandemi *Covid-19*.

Bertepatan dengan rilis pertumbuhan ekonomi, BPS juga melaporkan Inflasi Indonesia periode April 2022 yang tercatat sebesar 0,95% (mtm) atau 3,47% (*yoy*). Dengan demikian, inflasi periode ini masih terjaga dalam kisaran target APBN tahun 2022 yakni sebesar  $3\pm 1\%$  (*yoy*) di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi global serta peningkatan inflasi di berbagai negara.

Menguatnya daya beli masyarakat turut mendorong peningkatan inflasi April yang bertepatan dengan momen HBKN Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Kondisi ini menjadi penanda bahwa daya beli masyarakat di masa Ramadan dan lebaran telah kembali ke level pra-pandemi. Komponen harga bergejolak (*volatile food/VF*) menjadi penyumbang utama inflasi April dengan andil 0,39% dan mengalami inflasi sebesar 2,30% (mtm) didorong oleh peningkatan harga al. minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices/AP*) mengalami inflasi sebesar 1,83% (mtm), 4,83% (*yoy*) disebabkan adanya kenaikan bensin jenis pertamax dan tarif angkutan udara. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 0,36% (mtm) atau 2,60% (*yoy*).

Sebagaimana tercermin dari pencapaian inflasi, prospek ekonomi pada Triwulan II-2022 diperkirakan semakin solid terutama karena mudik lebaran 2022 kembali diperbolehkan. Ditambah lagi, berbagai leading indicator juga menunjukkan prospek cerah pemulihan ekonomi, antara lain tercermin dari peningkatan Indeks Penjualan Riil dan PMI Sektor Manufaktur. Indikator eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, dan nilai tukar rupiah serta IHSG yang menguat.

Momentum pemulihan ekonomi ini perlu kita jaga dan tingkatkan bersama sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 tetap dapat tumbuh tinggi. Disamping itu, reformasi struktural akan terus dilanjutkan sebagai strategi jangka menengah panjang agar kita dapat keluar dari jebakan *middle income trap*.

Dalam jangka pendek, di tengah kenaikan inflasi global, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, diantaranya bantuan sosial reguler terhadap masyarakat miskin, serta beberapa kebijakan bantuan yang bersifat afirmatif seperti bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).

Dalam jangka menengah, guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian global, Pemerintah terus mempercepat reformasi struktural, diantaranya melalui implementasi UU Cipta Kerja, kemudahan perizinan melalui OSS-RBA, mitigasi perubahan iklim melalui percepatan *green economy*, serta meningkatkan kapasitas investasi nasional melalui *Indonesia Investment Authority (INA)*.

### **3.1.2. Perekonomian Regional/Provinsi**

Perekonomian Jawa Tengah Triwulan I tahun 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp375.951,52 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp257.706,70 miliar. Pertumbuhan Positif Perekonomian Jawa Tengah Triwulan I-2022 (*y-on-y*) sebesar 5,16 persen. Capaian triwulan ini lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2021 yang mengalami kontraksi -0,55 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 51,13 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 10,33 persen. Dibandingkan kinerja pada Triwulan IV-2021, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2022 tumbuh sebesar 1,75 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 36,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 7,45 persen.

Ke depan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan kembali menguat. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti *Prompt Manufacturing Index (PMI)* dan perkembangan indeks penjualan ritel yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2022 diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan 2021 seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus *Covid-19*, dan meningkatnya permintaan global serta domestik.

### **3.1.3. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo**

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 3,82 persen sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,7 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2021 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022

ekonomi daerah diproyeksikan tumbuh moderat sebesar 3,5 – 4,3 persen. Pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan merupakan hasil kontribusi pertumbuhan yang progresif utamanya dari sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta diperkuat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi dan informasi dan komunikasi dimana keempat sektor/lapangan usaha tersebut merupakan komponen pembentuk PDRB paling besar/dominan selama ini.

Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,64 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 6,26 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,7 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu minus 0,8 persen. Berikut Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2018–2021:

**Tabel 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2018–2021**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	3,37	0,94	3,58
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	-1,62	-0,21	1,56
C	Industri Pengolahan	6,47	5,65	-2,75	2,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	5,25	-2,38	4,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,25	6,89	2,35	3,65
F	Konstruksi	5,61	5,73	-2,86	4,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,62	5,53	-3,50	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	7,23	7,50	-31,75	3,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	7,47	-7,27	5,07
J	Informasi dan Komunikasi	10,13	10,38	25,75	9,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	3,47	2,30	1,67
L	Real Estat	6,45	6,37	0,08	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	8,54	9,32	-1,67	3,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	3,81	-2,41	-0,80
P	Jasa Pendidikan	7,13	8,07	-2,64	1,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,33	7,39	11,27	0,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,25	9,18	-3,01	1,10
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,79</b>	<b>5,92</b>	<b>-1,70</b>	<b>3,82</b>

*Catatan : \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*

*Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 adalah 38,9 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 36,91 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam



pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,98 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,28 persen. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (miliar rupiah), 2017–2021 ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (miliar rupiah),**  
**2017–2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2 894,16	3 006,50	3 158,31	3 229,38	3 371,91
B	Pertambangan dan Penggalian	149,57	156,87	155,93	158,79	163,26
C	Industri Pengolahan	12 233,45	13 359,37	14 417,55	14 423,67	15 198,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,50	38,35	40,47	39,24	40,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur	11,24	11,79	13,23	13,79	14,44
F	Konstruksi	2 137,04	2 340,89	2 542,72	2 475,84	2 674,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 573,87	5 943,00	6 415,80	6 274,28	6 736,68
H	Transportasi dan Pergudangan	1 043,70	1 131,69	1 239,87	873,82	933,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 171,18	1 273,73	1 394,08	1 307,90	1 398,96
J	Informasi dan Komunikasi	1 422,25	1 576,22	1 762,34	2 224,97	2 440,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 234,85	1 322,12	1 390,95	1 428,11	1 499,53
L	Real Estat	706,58	771,15	836,59	839,26	865,31
M N	Jasa Perusahaan	128,02	142,48	159,55	161,60	168,81
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746,96	790,16	832,98	823,37	809,09
P	Jasa Pendidikan	1 385,95	1 522,09	1 678,97	1 666,04	1 709,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308,65	339,31	370,89	423,36	427,89
R S T U	Jasa Lainnya	438,43	485,55	535,63	527,12	538,14
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>31 621,41</b>	<b>34 211,25</b>	<b>36 945,88</b>	<b>36 890,53</b>	<b>38 990,46</b>

*Catatan : \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*

*Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain*

Mengacu pada kondisi pandemi Nasional dan Daerah khususnya pada awal Kuartal II, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan koreksi atas asumsi makro daerah sebagaimana tercermin pada Indikator Makro Perekonomian Daerah pada Dokumen RKPD 2022. Adapun data secara lengkap indikator makro sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian dan Proyeksi Indikator Perekonomian Daerah**  
**Kaupaten Sukoharjo**

No	Indikator	Capaian 2021	Proyeksi	
			RKPD 2022	P RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,82	3,5-4,3	3,5-4,3
2	Inflasi (%)		3-4	3-4
3	Nilai Investasi PMDN/PMA (Juta)	9.045.557	9.407.380	9.407.380
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,32	4,78-4,66	4,78-4,66
5	Angka Kemiskinan (%)	8,23	8,2-7,6	8,2-7,6

6	Pendapatan Per Kapita (juta)	42.771	42.651	42.771
---	------------------------------	--------	--------	--------

Sumber : Bappelbangda (data diolah)

### 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan tahun 2022 secara keseluruhan sampai dengan triwulan II terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan asli daerah dan pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kerangka pendanaan.

#### 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan akibat dari mulai pulihnya perekonomian daerah pasca Pandemi Covid-19. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 397.894.372.736,- atau naik sebesar 11,14 persendibandingkan dengan target pendapatan yang ditetapkan sebelumnya dalam APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp. 357.999.604.000,-. Kenaikan terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 39,894 milyar atau naik 17,34 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 5.357 Milyar atau naik 0,35 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan.

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan naik 11,14 persen, kenaikan terjadi pada komponen Pajak Daerah sebesar 30 Milyar atau Rp. 30,3 milyar dengan penyumbang kenaikan terbesar pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 25 Milyar. Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 0,35 persen yang disebabkan penurunan target pada Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik 0,86 persen.

Pendapatan Transfer pada komponen Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar Rp. 3,295 Milyar atau 0,24 persen, dengan kenaikan pada Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan komponen Transfer Pemerintah Daerah naik sebesar Rp. 2,061 Milyar, dengan kenaikan pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah pasca pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain:

- a. Optimalisasi pungutan PAD, melalui:
  - 1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - 2) Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
  - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepadamasyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
  - 4) Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
- b. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

- c. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
  - d. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- Selanjutnya proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**  
**(dalam ribuan)**

NO	U R A I A N	APBD 2022	P RKPD2022	(+/-)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.893.440.960</b>	<b>1.938.692.823</b>	<b>45.251.863</b>	<b>2,39%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>357.999.604</b>	<b>397.894.373</b>	<b>39.894.769</b>	<b>11,14%</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	174.700.000	205.000.000	30.300.000	17,34%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.875.528	20.759.577	(115.951)	-0,56%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.525.775	39.098.714	8.572.939	28,08%
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.898.301	133.036.082	1.137.781	0,86%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.532.441.356</b>	<b>1.537.798.450</b>	<b>5.357.094</b>	<b>0,35%</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.348.843.356	1.352.138.579	3.295.223	0,24%
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah	183.598.000	185.659.871	2.061.871	1,12%
<b>1.3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
1.3.2	Lain-2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	-	-	-	0,00%

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo

### 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2022 tetap diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022. Selanjutnya arah kebijakan belanja dalam perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19;
2. Peningkatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas;
3. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2021-2026;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengkomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif dan masukan masyarakat;

Berikut proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**  
**(dalam ribuan)**

NO	U R A I A N	APBD 2022	P R KPD2022	(+/-)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.122.441.234</b>	<b>2.279.819.843</b>	<b>157.378.609</b>	<b>7,41%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.536.221.178</b>	<b>1.592.428.065</b>	<b>56.206.887</b>	<b>3,66%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	894.948.851	889.948.138	(5.000.714)	-0,56%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	592.232.835	654.702.066	62.469.231	10,55%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	1.478.511	1.478.511	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	45.264.401	44.073.350	(1.191.051)	-2,63%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.296.580	2.226.000	(70.580)	-3,07%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>261.429.930</b>	<b>211.260.898</b>	<b>(50.169.032)</b>	<b>-19,19%</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>18.620.856</b>	<b>113.900.000</b>	<b>95.279.144</b>	<b>511,68%</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>306.169.270</b>	<b>362.230.880</b>	<b>56.061.610</b>	<b>18,31%</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	24.838.738	39.789.437	14.950.699	60,19%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	281.330.532	322.441.443	41.110.911	14,61%

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo pada perubahan tahun 2022 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD TA. 2021. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah makadilakukan penyesuaian/penundaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 saat ini diarahkan fokus pada penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu untuk menutup defisit anggaran. Selanjutnya proyeksi pembiayaan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**  
**(dalam ribuan)**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>P R KPD2022</b>	<b>(+/-)</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>229.000.274</b>	<b>341.704.999</b>	<b>112.126.746</b>	<b>48,96%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>257.500.274</b>	<b>361.704.999</b>	<b>361.704.999</b>	<b>140,47%</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	257.500.274	361.704.999	361.704.999	140,47%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	0,00%
3.1.7	Pencairan Deposito	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>257.500.274</b>	<b>361.704.999</b>	<b>361.704.999</b>	<b>140,47%</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>70,18%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000	-	-	0,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>70,18%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>229.000.274</b>	<b>341.704.999</b>	<b>341.704.999</b>	<b>149,22%</b>

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**

Visi pembangunan daerah tersebut di atas merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target		
						RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	65	65	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81
					Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE)	Nilai	3,64	3,64
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Predikat	B	B

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	
						RKPD 2022	P RKPD 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintahan (AKIP)			
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,461	1,461
				Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	II	II
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	81	81
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas						
		Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,73	77,73
				Angka Kemiskinan	%	8,2-7,6	8,2-7,6
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,70	77,70
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,35	9,35
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,84	13,84
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,51	96,51
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	41,90	41,90
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	23	23
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,20	4,20
				Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,85	2,85
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi						
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5-4,3	3,5-4,3
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,78-4,66	4,78-4,66
				Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	42,651	42,651
		Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	12	12
				Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	2,80	2,80
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,69	4,69
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,37	5,37
				Pertumbuhan investasi	%	12	12

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target								
						RKPD 2022	P RKPD 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8							
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,40	2,40							
				Skor Pola Pangan Harapan	%	93,6	93,6							
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	84,00	84,00							
				Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7356	0,7356						
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	61,96	61,96							
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,12	61,12							
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	93,00	93,00							
				Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	78,59	78,59						
					Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	68,36	68,36						
					Indeks Fatalitas	Angka	0,265	0,265						
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	58	58						
					Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,50	50,50						
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23						
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09	31,09						
								Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,32	0,32			
								5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan					
														Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,72											
	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	78	78									

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2022



Memperhatikan 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

a. Arahan Presiden

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi;
- 5) Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi;

b. Arahan Presiden tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional meliputi:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022**

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

#### **4.2.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Perubahan RKPD Tahun 2022**

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Hukum dan Pemerintahan, diarahkan pada:
  - a. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Government*) dengan pelayanan prima di semua instansi pemerintah,
  - b. Tata kelola pemerintahan dengan mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi,
  - c. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
  - d. Penyederhanaan birokrasi dengan memprioritaskan pemangkasan prosedur birokrasi yang panjang.
  - e. Peningkatan pelayanan publik, pelayanan hukum dan sosialisasi produk hukum bagi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik.
  - f. Meningkatkan keamanan dan menjaga kondusifitas daerah.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan, diarahkan pada:
  - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan PAD, dengan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, ekstensifikasi dan diversifikasi.
  - b. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah,
  - c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional dalam memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  - d. Peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan produksi pertanian.
  - e. Pengembangan agrobisnis dan kawasan agropolitan dan usaha produktif peternakan.

- f. Melakukan Transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
  - g. Penanganan dampak ekonomi pasca pandemic covid-19 bagi masyarakat.
  - h. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.
3. Bidang Pembangunan, diarahkan pada:
- a. Pembangunan infrastruktur fisik yang memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan social bagi masyarakat desa.
  - b. Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan peningkatan ketahanan bencana.
  - c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jalan lingkar, dan jembatan.
  - d. Mengingat dana desa tidak lagi fokus pada pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, maka perlu adanya inventarisasi dan penambahan jalan poros desa.
  - e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup terutama persampahan dan pencemaran lingkungan.
  - f. Pembangunan saluran drainase dan trotoar untuk pejalan kaki di wilayah perkotaan.
  - g. Penataan wajah kota dan pemukiman kumuh yang konsisten dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah ada.
  - h. Peningkatan kompetensi jasa konstruksi, dan pembangunan rumah tidak layak huni yang tepat sasaran.
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada:
- a. Ketenagakerjaan
    - 1) Dalam tenaga kerja diharapkan menambah infrastruktur di BLK.
    - 2) Membangun Balai Latihan Kerja yang representatif dan modern guna untuk melatih tenaga kerja lebih nyaman.
    - 3) Membuka latihan kerja sesuai pangsa pasar dan menyediakan alat praktik yang memadai.
    - 4) Menginformasikan lowongan kerja sampai desa-desa agar masyarakat desa cepat mengetahui dan tidak ketinggalan informasi kerja (tidak diisi masyarakat dari kabupaten lain).
  - b. Pemuda dan Olahraga
    - 1) Pembinaan bidang pemuda perlu dipertajam dengan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya pemuda sehingga tercipta generasi muda yang berkualitas dan berkarakter.
    - 2) Atlet olahraga perlu perhatian khusus dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga melahirkan prestasi atlet ditingkat regional, nasional dan internasional.
  - c. Pemberdayaan Perempuan
    - 1) Penambahan gizi kepada balita gizi buruk dan penyuluhan kepada orang tuanya agar balita gizi buruk segera teratasi.

- 2) Perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan kesetiap elemen masyarakat untuk menekan kekerasan pada perempuan dan anak.
  - 3) Perbanyak perhatian khusus untuk menekan angka stunting.
  - 4) Perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada kaum muda atau karang taruna untuk menyediakan pernikahan agar terwujud keluarga yang bahagia sejahtera guna menurunkan angka perceraian akibat pernikahan usia dini dan untuk mencegah seks bebas.
- d. Sosial
- 1) Perlu dilakukan validasi data penerima PKH, KIS dan BPJS PBI.
  - 2) Penyandang cacat berat yang ada di wilayah Sukoharjo sudah ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat setiap bulan Rp 300.000, berarti perharinya Rp 10.000. Akan tetapi masih banyak yang belum terbantu sama sekali, perlu didata kembali karena masih banyak yang belum tercover.
  - 3) Bantuan untuk panti asuhan dan yatim piatu itu kalau tidak salah mendapatkan bantuan dari provinsi Rp 3.000 per hari. Seyogyanya, pemerintah daerah menambahkan bantuannya untuk makan kesehariannya.
- e. Keagamaan
- 1) Pendataan TPQ di kabupaten Sukoharjo.
  - 2) Pemberian honor guru, dan peningkatan sarana prasarana TPQ.
- f. Kesehatan
- 1) Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Rumah tanpa Kelas, RSUD.
  - 2) Pengandaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa.
  - 3) Meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedis.
  - 4) Pelayanan kesehatan dasar yang menjangkau masyarakat miskin dan korban PHK akibat dampak pandemi Covid-19 serta ada alokasi dana jaring pengaman sosial bidang kesehatan.
  - 5) Peningkatan profesionalitas pelayanan kesehatan baik tenaga medis, tenaga kesehatan agar diberi fasilitas operasional sepeda motor bagi para bidan desa.
- g. Pendidikan
- 1) Pemenuhan kebutuhan PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK.
  - 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

#### **4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 diarahkan pada **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia"**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan *stunting* dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan, didukung penguatan sistem kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pembiayaan kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;
  - b. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalisasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai-nilai luhur bangsa;
  - c. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - d. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka;
  - e. Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan peningkatan intensitas penyelenggaraan *event* olahraga dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
  - f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah;
- 2) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400);
  - b. Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*;
  - c. Penguatan kewirausahaan dan peningkatan produksi industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
  - d. Pengembangan destinasi wisata;
  - e. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah;
  - f. Pemberian fasilitasi kemudahan berinvestasi;
  - g. Peningkatan sarana dan prasana jalan dalam mendukung performa wilayah dan kemudahan berusaha;

- h. Pembangunan, revitalisasi embung dan jaringan irigasi air tanah dalam sebagai sumber air irigasi pertanian;
  - i. Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
  - j. Memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), bibit, pupuk dan pestisida;
  - k. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan;
  - l. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
  - m. Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  - n. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.
- 3) Peningkatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, dengan fokus pada:
- a. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi *Covid-19*;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*direct services*) dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan inovatif;
  - c. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - d. Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
  - e. Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memedomani Dokumen *Road Map* Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  - f. Percepatan implementasi pilar-pilar utama yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan kota cerdas (*smart city*);
  - g. Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama.
- 4) Pengurangan Kemiskinan, dengan fokus kepada:
- a. Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses

- pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;
- b. Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - d. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, melalui: pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan *e-commerce* bagi UMKM serta penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;
  - e. Penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.
- 5) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana, dengan fokus kepada:
1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;
  2. Peningkatan kompetensi jasa konstruksi;
  3. Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
  4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;
  5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;
  6. Penuntasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;
  7. Meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan;
  8. Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

- 6) Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;
  - c. Peningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik.
- 7) Kerjasama regional, Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat, dengan fokus pada:
  - a. Perluasan kerjasama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target SPM;
  - b. Perluasan kerjasama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/inafaq dalam kegiatan pembangunan;
  - c. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah tahun 2022 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kabupaten Sukoharjo yaitu:

**1. Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, melalui:**

- a. Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik;
- b. Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- c. Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- d. Mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian *problem solving* di masyarakat berbasis online;
- e. Membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial dan bencana.

**2. Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan, melalui:**

- a. Bantuan kepada Lembaga Desa/Kelurahan dan RT se-Kabupaten Sukoharjo;
- b. Memfokuskan tata lingkungan di wilayah RT melalui peningkatan Alokasi Dana Desa dan Dana Kelurahan;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa;



- d. Penguatan BUMDes.
- 3. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Kader Pembangunan Daerah, melalui:**
  - a. Bantuan operasional kader posyandu;
  - b. Bantuan operasional kader sanggar inklusi;
  - c. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Posyandu;
  - d. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Difabel Sanggar Inklusi;
  - e. Bantuan operasional Kader PKK Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- 4. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan, melalui :**
  - a. Peningkatan bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
  - b. Pengajian rutin;
  - c. Pembinaan mental keagamaan di setiap instansi pemerintah.
- 5. Penerapan Pendidikan bagi Semua yang Terjangkau, melalui:**
  - a. Menyediakan fasilitas online untuk mendukung proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19;
  - b. Penerapan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri;
  - c. Bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah swasta tingkat PAUD, TK, SD, SMP;
  - d. Bantuan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
  - e. Peningkatan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara berjenjang;
  - f. Penerapan pendidikan karakter kepada siswa;
  - g. Mengoptimalkan sanggar inklusi bagi masyarakat penyandang disabilitas;
  - h. Pelatihan gender.
- 6. Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19, melalui:**
  - a. Vaksinasi Covid-19 gratis;
  - b. Memperluas deteksi Covid-19 melalui *rapid test* massal dan pengadaan PCR (*Polymerase Chain Reaction Swab test*);
  - c. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
  - d. Memfasilitasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan dengan penjemputan pasien;
  - e. Berobat gratis bagi keluarga miskin melalui Jamkesda, Jampersal dan pengelolaan Premi Asuransi Kesehatan;
  - f. Membudayakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
  - g. Pembangunan Rumah Sakit di Eks - Terminal Kartasura.
- 7. Jaringan Pengaman Sosial Pasca Pandemi Covid-19, melalui :**
  - a. Bantuan Sembako berbasis data terpadu;
  - b. Santunan Kematian berbasis data terpadu.
- 8. Pengembangan Keolahragaan dan Pengembangan Generasi Muda, melalui:**

- a. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
- b. Pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi;
- c. Meningkatkan event kejuaraan bidang olahraga di berbagai cabang olahraga;
- d. Pelatihan *startup* untuk wirausaha muda.

**9. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, melalui:**

- a. Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Bantuan sarana produksi bagi UMKM;
- c. Fasilitasi akses online pemasaran pada setiap pasar;
- d. Gerakan Beli Produk Sukoharjo;
- e. Jaringan Kemitraan Pemasaran dengan swalayan;
- f. Memperluas jaringan Online Toko PAS (Produk Asli Sukoharjo);
- g. Online Market Place UMKM;
- h. Pelatihan *E-commerce* bagi UMKM.

**10. Penguatan Produksi Petani, melalui:**

- a. Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*;
- b. Pemberian bantuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT);
- c. Pembangunan, revitalisasi embung dan jaringan irigasi air tanah dalam sebagai sumber air irigasi pertanian;
- d. Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
- e. Memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Bibit, Pupuk dan Pestisida;
- f. Pengembangan pertanian organik dan pertanian terpadu;
- g. Pengembangan Pasar Mitra Tani di setiap kecamatan.

**11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif, melalui:**

- a. Pengembangan daerah tujuan wisata di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Pengembangan desa wisata di setiap kecamatan;
- c. Inovasi atraksi dan festival wisata dengan komunitas masyarakat;
- d. Pelibatan wisatawan dalam proses pembuatan produk unggulan daerah;
- e. Pengembangan souvenir dan kuliner.

**12. Penguatan Infrastruktur Daerah, dengan:**

- a. Pengaspalan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kelurahan dan Poros Desa;
- b. Pembangunan Gedung Pertemuan Eks Gedung Budi Sasono;
- c. Penanganan sampah melalui Bank Sampah di desa/kelurahan;
- d. Bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- e. Pengembangan tata kota kecamatan;
- f. Melanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Timur;
- g. Revitalisasi sistem drainase perkotaan untuk menanggulangi banjir;

h. Mencukupi kebutuhan air minum bagi wilayah yang mengalami kekeringan.

### 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

#### 4.3.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 yang meliputi:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD 2022	Target P RKPD 2022
-1	-2	-3	-4	-5
1	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	69	69
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,73	77,73
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,51	96,51
4	Angka Kemiskinan	%	8,2 – 7,6	8,2 – 7,6
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5-4,3	3,5-4,3
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,78-4,66	4,78-4,66
7	Pendapatan perkapita	Jt Rp	42,651	42,651
8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	61,96	61,96
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,12	61,12
10	Indeks Resiko Bencana	Nilai	93	93
11	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	86,83	86,83

#### 4.3.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut IKU Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022:

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo**  
**Tahun 2022**

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	T	11	11
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	T	14	14
1.1	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	60	60
1.2	Meningkatnya kualitas dan Akses pendidikan masyarakat	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,53	69,53
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,85	99,85
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	80,12	80,12
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4.1.1.(d)	%	109,28	109,28
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 4.1.1.(e)	%	108,1	108,1
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
		Capaian SPM Pendidikan	%	87,51	87,51
1.3	Meningkatnya profesionalisme Pendidik	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	95,47	95,47
2	Terwujudnya kearifan budaya local	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	20	20
2.1	Meningkatnya pengembangan Kesenian, nilai budaya dan Pelestarian situs, Cagar Budaya dan budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	2	2
3	Terwujudnya Destinasi wisata yang berdaya saing	Persentase Destinasi Pariwisata yang direvitalisasi	%	27	27
3.1	Meningkatnya kunjungan wisata a.Domestik	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	orang	128000	128000
	b.Mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	225	225
Dinas Kesehatan					
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	T	77,5	77,5
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	%	96	96
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	%	7	7

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	%	9	9
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	96	96
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	64	64
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	27	27
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75	75
Rumah Sakit Umum Daerah					
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	T	77,5	77,5
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	%	96	96
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	7	7
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	%	9	9
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	96	96
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	64	64
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	27	27
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75	75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Terwujudnya kualitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	indeks	68,36	68,36
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik, sarana dan prasarana dasar masyarakat	Akses air minum yang layak	%	94	94
		Akses layanan Sanitasi	%	98,5	98,5
		Rasio Jaringan Irigasi	%	46	46
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	6,56	6,56
		Rasio bangunan sesuai ketentuan	%	20,82	20,82
		Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88	88
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	55	55
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72	72
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan permukiman	Persentase Lingkungan Hunian Layak	%	78,59	78,59
1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM Perumahan Rakyat	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100	100

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
1.2	Meningkatnya RTLH menjadi RLH	Prosentase pemenuhan rumah yang layak	%	74,24	74,24
1.3	Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	73,35	73,35
1.4	Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dan Tertangani dengan baik	%	17,64	17,64
1.5	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	60	60
Sekretariat Daerah					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	81	81
		Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	81	81
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	65	65
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	100
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	73	73
Sekretariat DPRD					
1	Terwujudnya Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sukoharjo	Indek Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan Masyarakat Yang Sasarannya DPRD)	angka	70	70
1.1	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Legislasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Legislasi	angka	70	70
1.2	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Penganggaran dan Pengawasan	angka	70	70
1.3	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	64	64
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85	85
1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	nilai	85	85
2	Tercapainya Pertumbuhan Investasi	Pertumbuhan investasi	%	12	12
2.1	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	%	100	100
2.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	71	71
Kecamatan Weru					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	87	87

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
	pelayanan publik yang responsif dan akuntabel				
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	62	62
Kecamatan Bulu					
3	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	80	80
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	51	51
Kecamatan Tawang Sari					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	87	87
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	56	56
Kecamatan Sukoharjo					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	87,5	87,5
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	61	61
Kecamatan Nguter					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	82	82
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	62	62
Kecamatan Bendosari					
3	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79	79
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	55	55
Kecamatan Polokarto					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	83	83
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas Aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	45	45
Kecamatan Mojolaban					
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	81	81

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
	Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel				
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	62	62
Kecamatan Grogol					
3	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79	79
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	60,31	60,31
Kecamatan Baki					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	82	82
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	56	56
Kecamatan Gatak					
1	Terwujudnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	82	82
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	55	55
Kecamatan Kartasura					
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	83,5	83,5
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	nilai	50	50
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Terwujudnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	78	78
1.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila	Presentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	%	81	81
1.2	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat;	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	78	78
1.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama	Presentase kegiatan kerukunan umat beragama	%	75	75
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	58	58
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Profesional Melalui Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif	Nilai Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	point	3	3
1.1	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	88,75	88,75



Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
1.2	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72	72
Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,34	90,34
1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan per UU daerah, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatnya kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	97,3	97,3
		Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	%	98,3	98,3
		Persentase anggota Satlinmas terlatih	%	54	54
		Persentase Tanggap Kebakaran (Respon Time)	%	95,3	95,3
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	65	65
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas	Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	84	84
1.1	Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75	75
1.2	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian program RPJMD terhadap target program RPJMD	%	80	80
1.3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	50	50
1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	nilai	65	65
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Terwujudnya Lingkungan sehat, aman tangguh berkelanjutan	Indeks Kapasitas Daerah	nilai	0,32	0,32
1.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	%	85	85
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	53	53
Badan Keuangan Daerah					
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan aset yg transparan dan akuntabel	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	angka	1,461	1,461
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LHP BPK atas LKPD	kategori	4	4
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	57	57
Dinas Sosial					
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,2	4,2

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
		Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,85	2,85
1.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	11,31	11,31
1.2	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	47,65	47,65
1.3	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100	100
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	60	60
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
1	Mengimplementasikan Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Indeks Sistem Merit	indeks	0,41	0,41
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	69	69
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	87	87
		Persentase Pengembangan ASN	%	82,75	82,75
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
1	Terwujudnya pertumbuhan Produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	%	84	84
1.1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	angka	22432	22432
1.2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Capaian Nilai SAKIP	poin	73,85	73,85
2	Terwujudnya pertumbuhan produktivitas PDRB sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,37	5,37
2.1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	40,29	40,29
Dinas Pangan					
1	Terwujudnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,6	93,6
1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Tingkat Konsumsi Energi (Kalori)	%	98,15	98,15
		Tingkat Konsumsi Protein	%	96,49	96,49
		Penguatan Cadangan Pangan	%	27	27
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	7,18	7,18
		Ketersediaan Bidang Pangan utama	%	214,6	214,6
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	%	88	88
1.2	Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72,01	72,01
Dinas Lingkungan Hidup					
1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	51	51
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	87,23	87,23
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	31,08	31,08

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
1.1	Meningkatnya standar kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)	%	50	50
		Prosentase timbunan sampah yang dikelola (LH)	%	99	99
		Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	39	39
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	63	63
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
1	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminduk	nilai	81	81
1.1	Meningkatnya Kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	65	65
1.2	Meningkatnya Kuallitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase terlayannya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100
		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	j	24	24
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Terwujudnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	nilai	1	1
1.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	60	60
1.4	Meningkatnya Desa Maju	Prosentase Berdirinya Bumdes	%	86,67	86,67
		Prosentase Desa Mandiri	%	4	4
1.5	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina	%	18,66	18,66
Dinas Perhubungan					
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	angka	0,305	0,305
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	1,5	1,5
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	26	26
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	66	66
Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	Terwujudnya Tata Kelola dan Ekosistem E-Government	Nilai Indeks Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	nilai	3,7	3,7
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	65	65
1.4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Indek KAMI	nilai	300	300
1.5	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Prosentase/cakupan data statistik sektoral	%	70,37	70,37
1.2	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	93,6	93,6

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
1.3	Meningkatnya kualitas Layanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,82	3,82
2	Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	nilai	3,4	3,4
2.1	Cakupan Infrastruktur TI	Cakupan Infrastruktur TI	%	58	58
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah					
1	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	%	3	3
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	12	12
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,69	4,69
1.1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi aktif	%	83	83
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	14	14
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100	100
1.2	Meningkatnya Wira Usaha Baru	Presentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	3,22	3,22
1.3	Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas	%	0,3	0,3
		Persentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	2	2
		Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	85	85
		Persentase Pasar Tertib Ukur	%	23	23
1.4	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	60	60
Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
1	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	41,9	41,9
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	64	64
1.2	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Cakupan pemberdayaan pemuda	%	13,75	13,75
1.3	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan prestasi olahraga	%	3,25	3,25
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
1	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang tertib dan peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	21	21
		Indeks Manajemen Kearsipan	indeks	49	49
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	65	65
1.3	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal	nilai	17	17
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Perpustakaan	%	39	39
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	96,51	96,51

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				RKPD 2022	P RKPD 2022
				Target	Target
1.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	76,22	76,22
1.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap anak	-	0,0001	0,0001
		Rasio kekerasan terhadap perempuan	-	0,0001	0,0001
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,87	0,87
2.1	Menurunnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,87	1,87
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	4,98	4,98
2.2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata usia kawin pertama wanita	T	23	23
2.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	66	66
Dinas Pertanian dan Perikanan					
1	Terwujudnya Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	rata-rata Prosentase Pertumbuhan Produksi sektor Pertanian	%	1,26	1,26
		Prosentase Pertumbuhan Nilai produksi perikanan (%)	%	3260	3260
1.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai dan Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	69,21	69,21
		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	78,91	78,91
		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	16,21	16,21
		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	ton	5684	5684
		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	ton	96,6	96,6
		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	ton	30,91	30,91
		Peningkatan Produksi bawang merah (Ton)	ton	5,93	5,93
		Peningkatan Produksi Cabe (Ton)	ton	9,36	9,36
		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	ton	5	5
		Peningkatan Produksi Tebu	ton	24,948	24,948
		Peningkatan Produksi Pisang	ton	21	21
		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	ton	3,219	3,219
1.3	Meningkatnya Produksi Daging dan telur yang berkualitas	Peningkatan Produksi Daging (Ton)	ton	244,4	244,4
		Prosentase Daging ASUH	%	92	92
1.4	Meningkatnya Produksi Perikanan dan nilai produksi Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	ton	421,57	421,57
		Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	ton	254098	254098
1.5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	0,5	0,5
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai SAKIP	poin	65	65

### 4.3.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Indikator tersebut tertuang ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**  
**Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1		Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5-4,3	3,5-4,3	SEKRETARIAT DAERAH
2		Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	42651	42651	SEKRETARIAT DAERAH
3		Angka kemiskinan	%	8,2-7,6	8,2-7,6	SEKRETARIAT DAERAH
4		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,73	77,73	SEKRETARIAT DAERAH
5		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,35	9,35	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
6		Angka usia harapan hidup	Tahun	77,7	77,7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
7		Tingkat pengangguran terbuka	%	4,78-4,66	4,78-4,66	SEKRETARIAT DAERAH
8		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	SEKRETARIAT DAERAH
9		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	SEKRETARIAT DAERAH
10		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,6	93,6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
11		Penguatan cadangan pangan	%	27	27	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
12		Penanganan daerah rawan pangan	%	7.18	7.18	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
13		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2.4	2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
14		Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40.29	40.29	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata – rata lama sekolah Penduduk	Tahun	10,58	10,58	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.2		Harapan lama sekolah	Tahun	13,84	13,84	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.3		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	69,53	69,53	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>				
1.4		SD/MI/Paket A	%	99,85	99,85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.5		SMP/MTs/Paket B	%	80,12	80,12	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>				

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.6		SD/MI/Paket A	%	109,28	109,28	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.7		SMP/MTs/Paket B	%	108,1	108,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Kelulusan</b>				
1.8		SD	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.9		SMP	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Melanjutkan</b>				
1.10		SD ke SMP	%	104,6	104,6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.11		SMP ke SMA	%	102,1	102,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Putus Sekolah (APS)</b>				
1.12		- SD	%	0,019	0,019	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.13		- SMP	%	0,04	0,04	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.14		Guru yang memenuhi kualifikasi S-I/D-IV	%	95,47	95,47	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Rasio Guru dan Siswa:</b>				
1.15		SD	siswa	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.16		SMP	siswa	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.17		Persentase capaian SPM Pendidikan	%	87,51	87,51	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>					
2.1	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,7	77,7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.2		AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	96	96	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.3		AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7.3	7.3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.4		AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8.5	8.5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.5		Stunting	%	7.7	7.7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.6		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	≥ 95	≥ 95	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.7		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	64	64	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.8		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	27	27	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.9		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.10		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.11		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.12		Pelayanan Kesehatan Balita	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.13		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.14		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.15		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.16		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.17		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.18		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.19		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.20		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	52,36	52,36	SEKRETARIAT DAERAH
3.2		Indek layanan infrastruktur	Nilai	68,36	68,36	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.3		Akses air minum yang layak	%	96	96	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.4		Akses sanitasi yang layak	%	98.5	98.5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.5		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	85.05	85.05	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.6		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	46	46	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.7		Prosentase drainase dalam kondisi baik	%	6.56	6.56	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.8		Rasio Bangunan Sesuai dengan Ketentuan	%	20,82	20,82	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.9		Ketaatan terhadap RTRW	%	55	55	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
4.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase lingkungan hunian layak	%	78.59	78.59	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.2		Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3		Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	74.24	74.24	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4		Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	73.35	73.35	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.5		Prosentase PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan tertangani dengan baik	%	17.64	17.64	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	90.72	90.72	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.2		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	97.3	97.3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.3		Persentase Penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	98.2	98.2	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.4		Persentase anggota satlinmas terlatih	%	54	54	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.5		Persentase tanggap kebakaran (respon time)	%	95.3	95.3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	93	93	SEKRETARIAT DAERAH
5.7		Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0.32	0.32	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.8		Capaian Mitigasi Bencana	%	85	85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>					
6.1	Dinas Sosial	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,2	4,2	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.2		Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,85	2,85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.3		Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	11,31	11,31	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.4		Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	%	47,65	47,65	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.5		Prosentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	80	80	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>					
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota)	%	84	84	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
1.2		Produktifitas Tenaga Kerja	Angka	92.78	92.78	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
1.3		Angka Pengangguran Terbuka	Angka	22.432	22.432	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
2.1	Dinas PPKBP3A	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,51	96,51	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76.22	76.22	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.3		Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	5,909722222	5,909722222	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.4		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1 : 10.400	1 : 10.400	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>					

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Dinas Pangan	Skor pola pangan harapan	%	93.6	93.6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.2		Tingkat konsumsi energi (kalori)	%	98.15	98.15	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.3		Tingkat konsumsi protein	%	96.49	96.49	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.4		Penguatan cadangan pangan	%	27	27	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.5		Penanganan daerah rawan pangan	%	7.18	7.18	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.6		Ketersediaan pangan utama	%	214.6	214.6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.7		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	87.78	87.78	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
<b>4</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
4.1	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,12	61,12	SEKRETARIAT DAERAH
4.2		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,5	50,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.4		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09	31,09	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.5		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	50	50	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.6		Prosentase timbulan sampah yang dikelola	%	99	99	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.7		Prosentase Luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	39	39	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
<b>5</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
5.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	80	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.2		Persentase terlayannya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.3		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jam	24	24	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
<b>6</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
6.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7356	0,7356	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.2		Prosentase Desa Mandiri	%	4	4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.3		Prosentase berdirinya BumDes	%	86,67	86,67	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6.4		Prosentase aparaturn pemerintah desa yang dibina	%	18.66	18.66	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
<b>7</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
7.1	Dinas PPKBP3A	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.2		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	1.87	1.87	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.3		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun(Age Spesifik Fertility Rate/ASFR)	Angka	4.98	4.98	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.4		Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	22	22	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>8</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>					
8.1	Dinas Perhubungan	Indeks Fatalitas	Angka	0,265	0,265	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.2		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,305	0,305	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.3		Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	1,50%	1,50%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.4		Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	26%	26%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
<b>9</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
9.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPBE	Nilai	3,64	3,64	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.2		Nilai/Indeks Internal SPBE	Nilai	3.7	3.7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.3		Nilai/Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	93,5	93,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.4		Nilai/Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,82	3,82	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.5		Nilai/Indeks Keamanan Informasi	Nilai	300	300	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERSANDIAN
9.6		Persentase/Cakupan Data Statistik Sektoral	%	70,37	70,37	URUSAN PEMERINTAHAN BID. STATISTIK
9.7		Nilai/Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,4	3,4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.8		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	58	58	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.10		Cakupan Infrastruktur TI	%	58	58	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab	
				RKPD 2022	P RKPD 2022		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
<b>10</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						
10.1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	%	2,8	2,8	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM	
10.2		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,59	99,59		
10.3		Prosentase koperasi aktif	%	82.5	82.5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM	
10.4		Prosentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinilai Kesehatan untuk Koperasi	%	14	14	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM	
10.5		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	12	12		
10.6		Persentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	3,22	3,22	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM	
<b>11</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>						
11.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85 (A)	85 (A)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL	
11.2		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Nilai	85	85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL	
11.3		Pertumbuhan Investasi	%	12	12	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL	
11.4		Realisasi Investasi	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL	
<b>12</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
12.1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	41,9	41,9	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
12.2		Cakupan pemberdayaan pemuda	%	13.75	13.75	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
12.3		Cakupan prestasi olahraga	%	3.25	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
<b>13</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>						
13.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	23	23	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN	
13.2		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN	
13.3		Persentase Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	22	22	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN	
13.4		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	2,5	2,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN	
<b>14</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>						
14.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	21	21	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
14.2		Prosentase Pengunjung Perpustakaan Per tahun	%	1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN
<b>15</b>	<b>KEARSIPAN</b>					
15.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Kearsipan	%	49	49	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
15.2		Pengawasan Kearsipan Internal	%	17	17	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>						
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>					
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Destinasi Pariwisata yang direvitalisasi	%	27	27	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
1.2		Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	128.000	128.000	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
2.3		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	225	225	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>					
2.1	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2.4	2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.2		Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	69.21	69.21	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.3		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	78.91	78.91	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.4		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	16.21	16.21	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.5		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	Ton	5,684.00	5,684.00	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.6		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	Ton	96.6	96.6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.7		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	Ton	30.91	30.91	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.8		Peningkatan Produksi bawang merah (Ton)	Ton	5.93	5.93	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.9		Peningkatan Produksi Cabe (Ton)	Ton	9.36	9.36	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.10		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	Ton	5	5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.11		Peningkatan Produksi Tebu	Ton	24.95	24.95	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.12		Peningkatan Produksi Pisang	Ton	21	21	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.13		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	Ton	3.219	3.219	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.14		Peningkatan Produksi Daging (Ton)	Ton	244.40	244.40	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.15		Peningkatan Produksi Daging Sapi (Ton)	Ton	20.40	20.40	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.16		Peningkatan Produksi Daging Kambing (Ton)	Ton	14.00	14.00	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.17		Peningkatan Produksi Daging Itik (ayam, bebek) (Ton)	Ton	210.00	210.00	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.18		Prosentase Daging ASUH	%	92.00	92.00	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
<b>3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>					
3.1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,69	4,69	
3.2		Prosentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas	%	0.3	0.3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.3		Prosentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	1.8	1.8	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.4		Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	84.6	84.6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.5		Prosentase Pasar Tertib Ukur	%	23.1	23.1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
<b>4</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>					
4.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40.29	40.29	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
<b>5</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
5.1	Dinas Petanian dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	Ton	421.57	421.57	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.2		Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	Rp.000	254,098	254,098	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.3		Angka Konsumsi Ikan	Angka	0.5	0.5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
1.1	Sekretariat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	65	65	SEKRETARIAT DAERAH
1.2		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.00	81.00	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.3		Evaluasi kepatuhan standart pelayanan publik	Nilai	81.00	81.00	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.4		Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	B	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.5		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.6		cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.7		cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.8		Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
2.1	Sekretariat Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Legislasi	Nilai	70	70	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
2.2		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengawasan Anggaran	Nilai	70	70	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>					
1.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Capaian target kinerja sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.2		Persentase sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan daerah	%	80	80	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.3		Persentase capaian program RPJMD terhadap target program RPJMD	%	80	80	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>					
2.1	Badan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1.461	1.461	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.2		Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.3		Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.4		Prosentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan kas yg telah ditetapkan	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.5		Prosentase jumlah OPD yg tepat waktu dalam penyampaian laporan akuntansi keuangan	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.6		Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.7		Prosentase peningkatan target PAD	%	3,50%	3,50%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					
3.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Sistem Merit	Indeks	Kategori II	Kategori II	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
				(Buruk)	(Buruk)	
3.2		Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	87	87	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
<b>4</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
4.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pengembangan ASN	%	84.5	84.5	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
<b>5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					



No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	20	20	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
1.1	Inspektorat	Nilai Penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	9	9	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.2		Level Maturitas SPIP	Level	3	3	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.3		Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>KECAMATAN</b>					
1.1	Kecamatan Baki	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.2	Kecamatan Grogol	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,8	95,8	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.3	Kecamatan Kartasura	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,7	96,7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.4	Kecamatan Tawangsari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,4	97,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.5	Kecamatan Nguter	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.6	Kecamatan Mojolaban	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,2	96,2	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.7	Kecamatan Gatak	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,5	97,5	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.8	Kecamatan Sukoharjo	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,5	97,5	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.9	Kecamatan Polokarto	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96	96	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.10	Kecamatan Bendosari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96	96	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.11	Kecamatan Bulu	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96	96	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.12	Kecamatan Weru	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,7	95,7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	78	78	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.2		Persentase masyarakat yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	%	40%	40%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.3		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	40%	40%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.4		Persentase Kegiatan kerukunan umat beragama	%	40%	40%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
1		Pertumbuhan investasi	%	12	12	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Penanggung Jawab
				RKPD 2022	P RKPD 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,59	99,59	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI DAN UMKM
3		Skor Pola Pangan Harapan	%	93,6	93,6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
4		Persentase penanganan gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	%	86,83	86,83	SEKRETARIAT DAERAH
5		Cakupan layanan telekomunikasi	%	20%	20%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	41,9	41,9	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7		Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,461	1,461	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
8		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	12	12	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
9		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,69	4,69	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
10		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,37	5,37	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN

#### 4.3.4. Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan

Pada tabel 4.5 di bawah ini memuat seluruh indikator program prioritas dan targetnya pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 4.5**

#### Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>I</b>	<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>		-	-	
<b>1,1</b>	<b>Pendidikan</b>				<b>DINAS P &amp; K</b>
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan	94,13	94,13	DINAS P & K
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	100	100	DINAS P & K
1 01 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	59,94	59,94	DINAS P & K
<b>1,2</b>	<b>Kesehatan</b>				<b>DKK</b>
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100%	100%	DKK
		Persentase FKTP terakreditasi	22%	22%	DKK
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	43%	43%	DKK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	40%	40%	DKK
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	49%	49%	DKK
		Persentase Capaian UHC	85%	85%	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	100%	100%	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	100%	100%	DKK
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprodksi	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	100%	100%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	67%	67%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	58%	58%	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	100%	100%	DKK
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	82%	82%	RSUD
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	<45‰	<45‰	RSUD
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100%	100%	RSUD
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	100%	100%	DKK
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	100%	100%	RSUD
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	76%	76%	DKK
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri	46%	46%	DKK
<b>1,3</b>	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>				<b>DPUPR</b>
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	46%	46%	DPUPR
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	70,33%	70,33%	DPUPR
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan persampahan di setiap desa/ kelurahan	4,19%	4,19%	DPUPR
1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	2,24%	2,24%	DPUPR
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	6,56%	6,56%	DPUPR
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap	26,10%	26,10%	DPUPR
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	26,24%	26,24%	DPUPR
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	60%	60%	DPUPR
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	31,07	31,07	DPUPR
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	DPUPR
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang	55%	55%	DPUPR
<b>1,4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				<b>DPKP</b>
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	0	0	DPKP
		Prosentase rumah korban bencana yang sudah tertangani	10	10	DPKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	31,81	31,81	DPKP
1 04 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani	40,71	40,71	DPKP
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	6,08	6,08	DPKP
2 04 06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Prosentase penerbitan sertifikasi pengembang perumahan	18,75	18,75	DPKP
<b>1,5</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat</b>				<b>SATPOL PP dan BPBD</b>
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada	97,3	97,3	SATPOL PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3)	98,2	98,2	SATPOL PP
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	54	54	SATPOL PP
01 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian mitigasi bencana	82%	82%	<b>BPBD</b>
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95,3	95,3	SATPOL PP
<b>1,6</b>	<b>Sosial</b>				<b>DINAS SOSIAL</b>
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	47,65	47,65	DINAS SOSIAL
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	100	100	DINAS SOSIAL
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	15,99	15,99	DINAS SOSIAL
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	4,13	4,13	DINAS SOSIAL
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	73,91	73,91	DINAS SOSIAL
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	1	1	DINAS SOSIAL
<b>2</b>	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>		-	-	
<b>2,7</b>	<b>Tenaga Kerja;</b>				<b>DISNAKERTRANS</b>
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK	90%	90%	DISNAKERTRANS
2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0	0	DISNAKERTRANS
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	83%	83%	DISNAKERTRANS
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	3	3	DISNAKERTRANS
<b>2,8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak</b>				<b>DPPKBP3A</b>
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	20	20	DPPKBP3A
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100	100	DPPKBP3A
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	0,15	0,15	DPPKBP3A
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data informasi PPPA yang tersedia	60	60	DPPKBP3A
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	675 (Madya)	675 (Madya)	DPPKBP3A
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100	100	DPPKBP3A
<b>2,9</b>	<b>Pangan</b>				<b>DINAS PANGAN</b>
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	10,78	10,78	DINAS PANGAN
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	120,8	120,8	DINAS PANGAN
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis:			DINAS PANGAN
		Telur	6,8	6,8	DINAS PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
		Bawang Merah	21,7	21,7	DINAS PANGAN
		Cabe	47,5	47,5	DINAS PANGAN
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	37,5	37,5	DINAS PANGAN
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	37,5	37,5	DINAS PANGAN
<b>2,10.</b>	<b>Pertanahan</b>				<b>DPUPR</b>
2 10 05	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Cakupan penanganan sengketa tanah garapan	24%	24%	DPUPR
2 10 04	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	40%	40%	DPUPR
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	48%	48%	DPUPR
<b>2,11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				<b>DLH</b>
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	39,00%	39,00%	DLH
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	40%	40%	DLH
		Prosentase wilayah yang memiliki kapasitas dan mitigasi perubahan iklim	27%	27%	DLH
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman keanekaragaman hayati (Kehati) yang dikelola	2.161,80	2.161,80	DLH
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	40%	40%	DLH
2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase ketaatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten	40%	40%	DLH
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	24%	24%	DLH
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	20%	20%	DLH
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	DLH
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	73%	73%	DLH
		Prosentase pengurangan sampah	26%	26%	DLH
<b>2,12</b>	<b>Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil</b>				<b>DISDUKCAPIL</b>
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	100%	100%	DISDUKCAPIL
2 12 03	Program Catatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Catatan Sipil	100%	100%	DISDUKCAPIL
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	DISDUKCAPIL
		2. Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	DISDUKCAPIL
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	DISDUKCAPIL
<b>2,13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>				<b>DPMD</b>
2 13 02	Program Penataan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	100	DPMD
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	4,67	4,67	DPMD
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40	40	DPMD
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa yang dibina	50	50	DPMD
<b>2,14</b>	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>				<b>DPPKBP3A</b>
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	25	25	DPPKBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	68,85	68,85	DPPKBP3A
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	74	74	DPPKBP3A
<b>2,15</b>	<b>Perhubungan</b>				<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	82%	82%	DINAS PERHUBUNGAN
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,27%	DINAS PERHUBUNGAN
		Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70,60%	70,60%	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	Kinerja layanan penyeberangan sungai	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Kinerja layanan perkeretaapian	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2,16</b>	<b>Komunikasi Dan Informatika</b>				<b>DISKOMINFO</b>
2 16 02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Badan Publik terbuka	35	35	DISKOMINFO
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	80	80	DISKOMINFO
		Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	58	58	DISKOMINFO
<b>2,17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>				<b>DISDAGKOP dan UKM</b>
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	100	100	DISDAGKOP dan UKM
2 17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	82,5	82,5	DISDAGKOP dan UKM
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Prosentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	14	14	DISDAGKOP dan UKM
2 17 05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	65	65	DISDAGKOP dan UKM
2 17 06	Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	4	4	DISDAGKOP dan UKM
2 17 07	Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM	6,66	6,66	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Fasilitas Peningkatan Perizinan bagi UMKM	26	26	DISDAGKOP dan UKM
2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan Omset Produk UMKM	26	26	DISDAGKOP dan UKM
<b>2,18</b>	<b>Penanaman Modal</b>				<b>DPMPPTSP</b>
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	100	100	DPMPPTSP
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	100	100	DPMPPTSP
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	2	2	DPMPPTSP
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	100	100	DPMPPTSP
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	100	100	DPMPPTSP
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	100	100	DPMPPTSP
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Realisasi Investasi	3	3	DPMPPTSP
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	100	DPMPPTSP
<b>2,19</b>	<b>Kepemudaan Dan Olah Raga</b>				<b>DINAS PEMUDA OR</b>
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	50	50	DINAS PEMUDA OR
		Persentase wirausaha muda	11	11	DINAS PEMUDA OR
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	62,5	62,5	DINAS PEMUDA OR
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	17,91	17,91	DINAS PEMUDA OR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
		Cakupan pembinaan atlet muda	29,04	29,04	DINAS PEMUDA OR
		Persentase atlet berprestasi	63,75	63,75	DINAS PEMUDA
2 19 04	Program Pengembangan Kepramukaan	Persentase Pramuka berprestasi	12	12	DINAS PEMUDA OR
<b>2,20.</b>	<b>Statistik;</b>				<b>DISKOMINFO</b>
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	100	<b>DISKOMINFO</b>
<b>2,21</b>	<b>Persandian</b>				<b>DISKOMINFO</b>
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi	100	100	<b>DISKOMINFO</b>
<b>2,22</b>	<b>Kebudayaan;</b>				<b>DINAS P &amp; K</b>
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	20	20	DINAS P & K
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan	10	10	DINAS P & K
2 22 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	2,5	2,5	DINAS P & K
<b>2,23</b>	<b>Perpustakaan</b>				<b>DISARPUS</b>
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	48	48	DISARPUS
02 23 03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	14	14	DISARPUS
<b>2,24</b>	<b>Kearsipan.</b>				<b>DISARPUS</b>
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			DISARPUS
02.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna			DISARPUS
<b>B.</b>	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>		-	-	
<b>3,25</b>	<b>Kelautan Dan Perikanan;</b>				<b>DISPERTAN</b>
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	396,25	396,25	DISPERTAN
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	14.329,54	14.329,54	DISPERTAN
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudisaya bersertifikat CBIB	35	35	DISPERTAN
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	5	5	DISPERTAN
3 25 06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	45	45	DISPERTAN
<b>3,26</b>	<b>Pariwisata</b>				<b>DINAS P &amp; K</b>
03 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	20	20	DINAS P & K
03 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase event pariwisata yang diadakan	11	11	DINAS P & K
03 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	400	400	DINAS P & K
<b>3,27</b>	<b>Pertanian</b>				<b>DIPERTAN</b>
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	95,5	95,5	DISPERTAN
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	92	92	DISPERTAN
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	72	72	DISPERTAN
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	49,75	49,75	DISPERTAN
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	44	44	DISPERTAN
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	33	33	DISPERTAN
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	20.228,76	20.228,76	DISPERTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
3 27 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen	3	3	DISPERTAN
		Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	0,1	0,1	DISPERTAN
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	70	70	DISPERTAN
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan klas kelompok	2	2	DISPERTAN
<b>3,30.</b>	<b>Perdagangan</b>				<b>DISDAGKOP dan UKM</b>
3 30 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	100	100	DISDAGKOP dan UKM
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat	84,6	84,6	DISDAGKOP dan UKM
3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga	100	100	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	6,4	6,4	DISDAGKOP dan UKM
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor	0,3	0,3	DISDAGKOP dan UKM
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Pasar Tertib Ukur	23,1	23,1	DISDAGKOP dan UKM
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	10	10	DISDAGKOP dan UKM
<b>3,31</b>	<b>Perindustrian</b>				<b>DISNAKERTRANS</b>
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase terselainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	17%	17%	DISNAKERTRANS
3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	90%	90%	DISNAKERTRANS
3 31 04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	DISNAKERTRANS
<b>3,32</b>	<b>Transmigrasi</b>				<b>DISNAKERTRANS</b>
3 32 02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Pemenuhan Alokasi Tujuan Transmigran	100	100	DISNAKERTRANS
<b>C.</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		-	-	
<b>4,1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>SETDA</b>
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	Bagian Pemerintahan
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	96	96	Bagian Hukum
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	Bagian Kesra
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan				
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	Bagian Perekonomian dan SDA
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	89	89	Bagian Administrasi Pembangunan
<b>4,2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi di Bidang Legislasi yang terlayani	70%	70%	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan dan Penganggaran Yang Terlayani	70%	70%	
<b>D.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		-	-	
<b>5,1</b>	<b>Perencanaan</b>				<b>BAPPELBANGDA</b>
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	100	100	BAPPELBANGDA
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah terhadap target kinerja program perangkat daerah	84%	84%	BAPPELBANGDA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>5,2</b>	<b>Keuangan</b>				<b>BKD</b>
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Dokumen Penganggaran yang tepat waktu	100	100	BKD
		Prosentase Pengendalian Luquiditas Kas Daerah	100	100	BKD
		Prosentase Ketepatan Penyampaian Laporan Akuntansi Keuangan	100	100	BKD
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase penatausahaan aset daerah yang tertib	100	100	BKD
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Target PAD	3,5	3,5	BKD
<b>5,3</b>	<b>Kepegawaian</b>				<b>BKPP</b>
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	100	100	BKPP
		Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan ASN	98	98	BKPP
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	65	65	BKPP
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	85	85	BKPP
<b>5,4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>BKPP</b>
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	84,5	84,5	BKPP
<b>5,5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				<b>BAPPELBANGDA</b>
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	15	15	<b>BAPPELBANGDA</b>
<b>E.</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		-	-	
<b>6,1</b>	<b>Inspektorat</b>				<b>INSPEKTORAT</b>
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil Pemeriksaan BPK	88,75	88,75	INSPEKTORAT
		Presentase Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	100	100	INSPEKTORAT
		Cakupan penilaian mandiri SPIP	15	15	INSPEKTORAT
		Persentase jumlah PDDT yang selesai ditangani	100	100	INSPEKTORAT
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan kebijakan teknis di bidang pengawasan	100	100	INSPEKTORAT
		Cakupan pendampingan dan Sistensi di bidang Pengawasan	100	100	INSPEKTORAT
		Persentase jumlah kasus yang ditangani sesuai kewenangannya	100	100	INSPEKTORAT
		Presentase OPD yang menerapkan manajemen risiko	15%	15%	INSPEKTORAT
<b>F.</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>7,1</b>	<b>Kecamatan</b>				<b>KECAMATAN</b>
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kartasura	83,5	83,5	KECAMATAN KARTASURA
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sukoharjo	87,5	87,5	KECAMATAN SUKOHARJO
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Grogol	79	79	KECAMATAN GROGOL
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mojolaban	81	81	KECAMATAN MOJOLABAN
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bendosari	80	80	KECAMATAN BENDOSARI
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Polokarto	80	80	KECAMATAN POLOKARTO
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Baki	82	82	KECAMATAN BAKI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Weru	78,5	78,5	KECAMATAN WERU
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Gatak	87,5	87,5	KECAMATAN GATAK
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tawang Sari	87	87	KECAMATAN TAWANGSARI
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Nguter	82	82	KECAMATAN NGUTER
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bulu	80	80	KECAMATAN BULU
<b>7 01 03</b>	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		<b>12</b>	<b>12</b>	
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN KARTASURA
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN SUKOHARJO
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN GROGOL
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN MOJOLABAN
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN BENDOSARI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN POLOKARTO
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN BAKI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN WERU
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN GATAK
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN TAWANGSARI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN NGUTER
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	KECAMATAN BULU
<b>7 01 04</b>	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		<b>12</b>	<b>12</b>	
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN KARTASURA
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN SUKOHARJO
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN GROGOL
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN MOJOLABAN
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN BENDOSARI
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN POLOKARTO
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN BAKI
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN WERU
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN GATAK
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN TAWANGSARI
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN NGUTER
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	KECAMATAN BULU
<b>7 01 05</b>	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		<b>12</b>	<b>12</b>	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN KARTASURA
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN SUKOHARJO
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN GROGOL
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN MOJOLABAN
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN BENDOSARI
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN POLOKARTO
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN BAKI
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN WERU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2022	P RKPD 2022	
1	2	3	4	5	6
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN GATAK
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN TAWANGSARI
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN NGUTER
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	KECAMATAN BULU
<b>7 01 06</b>	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<b>12</b>	<b>12</b>	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN KARTASURA
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN SUKOHARJO
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN GROGOL
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN MOJOLABAN
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN BENDOSARI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN POLOKARTO
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN BAKI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN WERU
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN GATAK
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN TAWANGSARI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN NGUTER
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	KECAMATAN BULU
<b>G.</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>8,1</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>KESBANGPOL</b>
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa	89	89	KESBANGPOL
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan pemahaman politik bagi pemilih pemula	78	78	KESBANGPOL
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan	78	78	KESBANGPOL
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	78	78	KESBANGPOL
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	79	79	KESBANGPOL

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan kedua dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal antara lain Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait perubahan alokasi, penyesuaian perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2022, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

**Tabel 5.1**  
**Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Perubahan RKPD Tahun 2022**

## **BAB VI PENUTUP**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Demikian juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD yang dibahas dengan DPRD. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, selain itu juga menjadi acuan bagi organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagai bentuk dari penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah tahun pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2021-2026, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target tahun 2022 yang berorientasi pada aspek pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang sudah disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta target capaian kinerja pembangunan daerah pada perencanaan tahun berjalan.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 diharapkan mampu mensinergikan seluruh pemangku kepentingan termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk ikut partisipasi

dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo guna optimalisasi pencapaian target pembangunan tahun berjalan dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik untuk mewujudkan visi **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”** sebagaimana yang kita cita-citakan bersama sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI